



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAN PENDAPAT  
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2014-2015  
MasaPersidangan : III  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : RDP  
Dengan : Dirut BPJS Ketenagakerjaan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 2 April 2015  
Waktu : 10:07:59 WIB – 13:53:49 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX  
Ketua Rapat : Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I. Pol/Ketua Komisi  
Sekretaris Rapat : Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag. Set Komisi IX DPR RI  
Acara : 1. Membahas Progres terkait :  
    a. Design Program Tata Kelola Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
    b. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
    c. Operasional Program Jaminan Pensiun Pekerja sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial  
2. Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam pendataan peserta BPJS termasuk peserta Tenaga Kerja Asing dan upaya menghadapi kendala ke depan  
    2. Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam pendataan peserta BPJS termasuk peserta Tenaga Kerja Asing dan upaya menghadapi kendala ke depan.
- Hadir : 40 dari 48 anggota

#### **PIMPINAN**

1. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I. Pol (FPD)
2. H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc (F-PG)
3. PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.Si (F-GERINDRA)
4. H. ASMAN ABNUR, SE., M.Si (F-PAN)
5. Dra. Hj. ERMALENA MHS (F-PPP)

#### **FRAKSI PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN (F-PDIP)**

6. Hj. ELVA HARTATI, S.IP., MM.
7. Ir. KETUT SUSTIAWAN
8. dr. RIBKA TJIPTANING
9. DANIEL LUMBAN TOBING
10. H. IMAM SUROSO, SH., S.Sos., MM.
11. N U R S U H U D
12. ABIDIN FIKRI, SH.
13. dr. KAROLIN MARGRET NATASA

#### **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)**

14. HJ. SANIA LATIVA, SE
15. HJ. DEWI ASMARA, SH, MH
16. H. BUDI SUPRIYANTO, SH, MH
17. ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked
18. Drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, SKG

#### **FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

19. K H A I D I R
20. Dr. H. SUIR SYAM, M. Kes.
21. SUSI SYAHDONNA BACHSIN, SE,MM
22. Drg. PUTIH SARI
23. ROBERTH ROUW

#### **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

24. Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD
25. SITI MUFATTAHAH, Psi.
26. Drs. AYUB KHAN

#### **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

27. Ir. H. A. RISKI SADIG
28. Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum.
29. HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, SH

#### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

30. H. MARWAN DASOPANG
31. H. HANDAYANI, SKM
32. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA.
33. Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA

#### **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

34. ANSORY SIREGAR, Lc.
35. H. HAMID NOOR YASIN, MM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

36. Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si

37. Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

38. Ir. ALI MAHIR, MM.

39. AMELIA ANGGRAINI

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

40. Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA

**JALANNYA RAPAT :**

**KETUA RAPAT (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I) :**

Bisa dimulai Pak Dirut?

***Assalamu'alaikum* warahmatullahi wabarakatuh**

**Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi .**

**Yang saya hormati Saudara Dirut BPJS Ketenagakerjaan Bapak Elvyn G. Masassya beserta seluruh jajaran.  
Pimpinan Komisi IX dan Bapak Ibu Anggota Komisi IX yang saya hormati.**

Saya kadang-kadang masih sering keliru antara sepuluh dan sembilan. Pada pagi hari ini kita akan melakukan RDP dengan Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan. Beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan Badan POM dan juga BKKBN telah melakukan Raker dan juga RDP membahas masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan di Republik . Hari ini kita akan mencoba berbicara masalah yang terkait dengan kesejahteraan ketenagakerjaan. Sampai hari ini adalah telah hadir 6 fraksi dan berapa anggota? Sembilan meskipun fraksi telah kuorum tetapi anggota belum kuorum .

Oleh karena itu kita buka karena waktu sudah lewat lebih setengah jam kita buka lalu kita skors beberapa saat untuk memenuhi syarat kuorum. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahiim* RDP saya buka dan sekaligus saya skors beberapa saat.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10:07:59 WIB)**

**(RAPAT DIBUKA UNTUK DISKORS)**

**KETUA RAPAT :**

***Assalamu'alaikum* warahmatullahi wabarakatuh.**

**Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati .**

Setelah kita skors beberapa saat dan anggota semakin bertambah, oleh karena itu kami cabut skors kembali dan kita lanjutkan RDP.

**(SKORS DICABUT)**

**Saudara Dirut yang saya hormati.**

Sesuai dengan agenda pada hari ini Komisi IX berharap ada penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan desain program dan tata kelola program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Yang kedua adalah penerbitan peraturan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, berikutnya adalah operasional program jaminan pensiun pekerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Selanjutnya adalah bagaimana kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam pendataan peserta BPJS termasuk peserta tenaga kerja asing dan upaya menghadapi kendala ke depan.

Ada juga hal-hal yang ingin diketahui adalah bagaimana kemungkinan pekerja-pekerja informal bisa menjadi anggota atau bisa menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, tidak saja pekerja formal. Seperti supir-supir atau segala macam itu yang juga bekerja sebenarnya cuma serabutan bagaimana kita memikirkan mereka itu bisa juga ada perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira itu beberapa hal pokok yang kami harapkan dari Saudara Dirut untuk kita jelaskan. Nah untuk sementara telah kita agendakan rapat ini sampai pukul 13 ya, apabila nanti masih diperlukan atau belum selesai kita perpanjang sampai sesuai kebutuhan. Setuju ya? Baik.

#### **(RAPAT : SETUJU)**

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Saudara Dirut untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal tersebut diatas.

Kami persilakan.

#### **DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN (ELVYN G MASASSYA):**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

**Yang terhormat Pimpinan Komisi IX DPR RI. Pak Dede,  
Pak Syamsul, Pak Asman,  
Bapak-bapak, Ibu-ibu Anggota Komisi IX DPR RI.**

Pagi hari ini kami memenuhi undangan dari Komisi IX untuk melakukan RDP . Ini adalah RDP yang kedua di tahun 2015 setelah yang pertama tanggal 26 Januari 2015. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal sebagaimana diminta dalam undangan yang dikirimkan kepada kami. Namun sebelum itu ijin kami sekali lagi untuk mengenalkan Anggota Direksi yang hadir pada pagi hari ini, kami ditemani oleh seluruh anggota direksi beserta senior manajemen BPJS Ketenagakerjaan khususnya terkait dengan hal-hal yang akan di sampaikan pada pagi hari ini.

Yang paling kanan adalah Pak Amri Yusuf sebagai Direktur Umum SDM, disebelahnya adalah Pak Achmad Riyadi Direktur Pelayanan dan Pengaduan, kemudian di sebelah saya ada Pak Agus Supriyadi Direktur IT dan Perencanaan Strategis BPJS Ketenagakerjaan, disebelah kiri saya Pak Jefry Haryadi sebagai Direktur Investasi, kemudian di sebelahnya adalah Pak Juneidi Direktur

Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga, kemudian disebelah kiri Pak Herdi Kristanto sebagai Direktur Keuangan, dibelakang kami adalah senior manajemen yang menjabat sebagai Kadiv atau Eselon I di BPJS Ketenagakerjaan.

### **Bapak-bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat.**

Ijin kan kami untuk memulai paparan ini dengan menyampaikan hal-hal sebagaimana ditanyakan dalam undangan. Paparan ini kami bagi menjadi beberapa bagian , sebelum sampai ke desain program kami ingin me-refresh kembali tentang mandat yang diberikan kepada BPJS Ketenakerjaan. Mohon ditayangkan , ijin sebentar Pak Pimpinan agar bisa kita cermati melalui tayangan. Sudah? Ada kesalahan teknis.

Sambil menunggu mumpung kita saling mengingat, Pak Ahmad Hafiz atau Pak Ahmad Riyadi ? Saya dapat kartu nama Ahmad Hafiz, Oh dibelakang, baik terma kasih Pak.

### **DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN :**

Sambil menunggu Pak Pimpinan kalau boleh karena tadi ada nama yang sama saya perkenalkan juga senior manajemen dari BPJS Ketenagakerjaan Kepala Divisi yang tadi disebutkan Pak Dede itu adalah Pak Ahmad Hafiz Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga. Jadi yang berhubungan dengan lembaga-lembaga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan , di sebelahny adalah Ibu Irum Kepala Divisi Keuangan, Kemudian di sebelahny Pak Dodo Kepala Divisi Investasi , disebelahny Pak Charles Kepala Divisi Akuntansi , disebelahny Dokter Gigi Hendro Kepala Divisi Pelayanan, kemudian disebelahny Pak Ahmad Kepala Divisi Perencanaan Strategis, dan yang paling ujung adalah Pak Debi Premadi selaku Kepala Divisi Sekretariat Badan atau kalau di institusi korporasi lebih dikenal sebagai corporate secretary, di belakangny masih ada Pak Pak Teguh ini Chief Manajemen Office (CMO) , kemudian sebelah kiri Pak Herdy Kepala Divisi Kepala Divisi Perluasan Kepesertaan , kemudian Pak Reksa ini Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum , sebelahny adalah Ibu Juni Kepala Divisi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Hadir semua disini untuk melengkapi RDP kita pada pagi hari ini.

Apakah sudah boleh dilanjutkan pak?

### **KETUA RAPAT :**

Ya sebelum Ini, itu dari baju putih untuk menjadi baju hitam itu berapa lama kira-kira dibutuhkan? Dari baju putih ke baju abu-abu, ditentukan oleh Keputusan Presiden Pak. Bukan soal waktu ya? Sudah ? Ya silakan Pak Dirut.

### **DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN :**

Terima kasih Pak Pimpinan.

Kami akan memulai untuk menyampaikan paparan tentang kesiapan kami khususnya terkait hal-hal yang ditanyakan .

Yang pertama adalah bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini menjalankan fungsi sebagai penyelenggara itu didasarkan atas amanah Undang-Undang mulai dari

Undang-undang 45, kemudian Undang-undang Nomor 3, lalu Undang-undang Nomor 40 dan terakhir adalah Undang-undang 24 Tahun 2011 sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai penyelenggara kami diamanahkan untuk menyelenggarakan 4 program yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun sedangkan jaminan kesehatan dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Ini sebagai perbedaan dari konsep sebelumnya dimana sebelumnya kami menyelenggarakan program hanya untuk kalangan swasta tetapi berdasarkan Undang-undang ini nanti PNS, TNI Polri juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk dalam hal ini adalah pemberi kerja dan pekerja serta tenaga kerja secara umum. Dalam angka menjalankan fungsi peran itu kami menyiapkan visi menjadi BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional dan pelayanan.

Untuk mencapai visi itu Bapak-bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Kami sudah menyiapkan *roadmap* sampai dengan 2018 dimana *roadmap* ini ada fase-fasenya dan di 2015 ini kami masuk pada *fase full programme operation* dengan empat program, kenapa disebut *full programme operation* karena sebelumnya sampai hari ini kami baru menyelenggarakan 3 program saja diluar program jaminan pensiun. Mulai 1 Juli 2015 nanti kami akan mengimplementasikan program baru yaitu program jaminan pensiun sehingga disebut sebagai *full programme operation*, Selanjutnya di 2016 kami memiliki ekspektasi konsep kita akan bisa menjadi institusi yang operasionalnya salam *excellent*, 2017 institusi yang *service-nya excellent* dan di 2018 nanti mudah-mudahan *Insyah Allah* bisa mengimplementasikan kesejahteraan dasar bagi pekerja. Ini adalah target-target kami dan ini sejalan dengan *roadmap* yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bappenas dan sudah diterangkan dalam Peraturan Presiden.

Berikutnya sebagaimana ditanyakan kami akan mengulas tentang desain program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana tadi kami utarakan ada empat program dimulai dengan program jaminan kecelakaan kerja. Falsafah dari jaminan kecelakaan kerja ini adalah prinsipnya asuransi sosial, kami memberikan pelayanan kesehatan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan dan memberikan santunan uang tunai. Kemudian para peserta yang menjadi, yang berhak mendapatkan itu adalah yang membayar iuran. Kemudian aspek *contingency* kalau mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, cacat total ataupun meninggal akan mendapatkan santunan semua ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Nah hal-hal yang kami siapkan dalam jaminan kerja itu adalah berikhtiar, berinisiatif untuk menambah manfaat bagi para pekerja yang menjadi peserta. Sebelumnya skemanya adalah skema jaminan kecelakaan kerja dengan iuran antara 0,24 % sampai 1,74%%, iuran ini berbeda-beda bergantung pada resiko sektor pekerja tersebut, Kalau bekerja di kota berbeda bekerja dilaut, berbeda bekerja dengan ditambang dan seterusnya itu yang membuat angka grade-nya berbeda. Saat ini para pekerja yang menjadi peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan hanya mendapatkan manfaat *treatment*, rehabilitasi dan juga penggantian alat-alat bantu jika mengalami kecelakaan kerja. Kami mem-*propose* di dalam Peraturan Pemerintah yang baru selain yang itu juga menambahkan kegiatan yang kami sebut dengan *return to work* atau kembali bisa bekerja, sehingga kalau ada pekerja mengalami kecelakaan kita akan bantu untuk menyembatkannya, memberikan pelatihan dan menempatkan kembali ke pekerjaan. Inilah hal baru yang kami sampaikan kami sebut sebagai *return to work*, itu untuk program JKK. Untuk

desain program JKM atau Jaminan Kematian hampir sama seperti JKK dasarnya adalah Undang-undang 40 , prinsip asuransi sosial santunan uang tunai, peserta harus membayar iuran dan yang bersangkutan meninggal dunia.

Lalu dalam skema yang baru untuk peserta program jaminan kematian ini akan mendapatkan manfaat santunan kematian, biaya pemakaman dan bagi pekerja yang anaknya masih berusia pendidikan sekolah kami akan memberikan beasiswa kepada anak pekerja tersebut. Ini adalah manfaat baru yang belum ada sebelumnya. Untuk mereka yang menjadi peserta iurannya hanya 0,3% dari upah yang mereka laporkan.

Berikutnya adalah program jaminan hari tua , semua falsafahnya mengacu di Undang-undang 40 yaitu prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib , kemudian uang tunai dibayar sekaligus sama dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangan, jadi ini mirip seperti tabungan, setiap bulan pekerja itu membayarkan iuran dan kemudian setelah mereka pensiun mereka mendapatkan akumulasi iurannya beserta hasil pengembangan. Pesertanya adalah membayar iuran dan mereka mendapatkan hak tersebut jika mencapai usia pensiun , meninggal dunia atau cacat total. Skema yang kami usulkan dalam PP terhadap program jaminan hari tua ini manfaat yang tadi tetap berlangsung yaitu akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan. Kami mengusulkan menambah manfaat baru yaitu para pekerja yang menjadi peserta bisa mendapatkan pinjaman uang muka kepemilikan rumah dan subsidi bunga untuk perumahan, lalu mereka juga bisa withdraw , mengambil sebagian dari tabungan itu setelah 10 tahun masa kepesertaan. Ini adalah hal-hal baru untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sedangkan yang berhak mendapatkan itu seperti tadi saya utarakan meninggal dunia cacat total atau pensiun. Iurannya 3,7% dari pemberi kerja dan tenaga kerjanya 2%. Untuk informasi Bapak-bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Dewan iuran yang 5,7% ini secara total relatif masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, di Singapura itu mencapai 34%, di Malaysia itu mencapai 22%, jadi kita relatif masih sangat rendah.

Berikutnya adalah jaminan pensiun, jaminan pensiun ini juga mengacu pada Undang-undang 40 asuransi sosial tabungan wajib polanya adalah manfaat pasti atau defined benefit , manfaatnya diterima setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia. Ini yang berbeda dengan program JHT yang sebelumnya kami sampaikan, program JHT itu akumulasi tabungannya diterima sekaligus pada saat pensiun, sedangkan pensiun ini diterima setiap bulan sampai yang bersangkutan meninggal dunia disitu perbedaannya. Pesertanya adalah yang harus membayar iuran , dia mendapatkan manfaat setelah mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat total.

Nah manfaat-manfaat jaminan pensiun ini dapat kami sampaikan di dalam tayangan tersebut ada 5 manfaat yaitu kalau pensiun hari tua yaitu memasuki usia pensiun sampai meninggal akan menerima manfaat tersebut, kemudian juga akan menerima manfaat pensiun jika yang bersangkutan mengalami cacat, lalu ada yang disebut sebagian pensiun janda atau duda yaitu ahli warisnya yang menerima pensiun tersebut, lalu kalau ahli warisnya janda atau duda meninggal dunia atau menikah lagi maka haknya beralih kepada anak yang bersangkutan, dan juga bisa berpindah kepada orang tuanya jika anaknya sudah tidak berhak lagi menerima. Ini adalah konsep dari manfaat jaminan pensiun yang manfaatnya diterima seumur hidup oleh yang bersangkutan.



Nah di dalam program jaminan pensiun itu kami selaku penyelenggara telah menyampaikan usulan kepada pemerintah hal-hal yang berhak diterima oleh para pensiunan tersebut. Yang berbeda dengan yang saya utarakan tadi bahwa pensiunan itu baru bisa menerima manfaat pensiun jika telah menjadi peserta selama 15 tahun atau sedikitnya 30 bulan atau 36 bulan terakhir. Masa iur 15 tahun ini agar yang bersangkutan bisa mendapatkan manfaat yang memadai dari tabungannya. Berikutnya untuk manfaat bulanannya yang akan diterima formulanya itu sudah dibicarakan yaitu 1% kali masa iur, masa iurnya tahun mengiur tambah rata-rata upah tertimbang selama masa iur. Dengan contoh kalau iurannya 8% menjadi peserta sejak 20 tahun masa iuran 36 tahun maka yang bersangkutan akan menerima setiap bulan sampai meninggal dunia lebih kurang 36% dari rata-rata upah tertimbangnya. Ini adalah simulasi dari manfaat jaminan pensiun.

### **Bapak-bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami hormati.**

Berikutnya bagaimana kesiapan kami terkait dengan peraturan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan .

Dalam Undang-undang BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan mandat mulai dari Pasal 3 bawa kami harus memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup bagi para peserta , lalu Undang-Undang SJSN Pasal 5 mengatakan BPJS itu harus dibentuk dengan Undang-Undang lalu Undang-Undang Pasal 5 juga mengatakan yang ada adalah dua BPJS yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan, lalu disebutkan hanya bisa dibubar dengan Undang-Undang dan program yang dijalankan meliputi kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Ini adalah mandat yang kami terima , dan berikutnya Pasal 70 juga mengatakan kami harus menyiapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ini.

Nah *update* tentang peraturan-peraturan pemerintah itu dapat kami sampaikan sebagai berikut, untuk program jaminan kecelakaan kerja ada 4 elemen besar yang perlu kami sampaikan.

Pertama mengenai iuran , iuran tidak berubah dengan yang sebelumnya yaitu 0,24% sampai dengan 1,74% untuk TK penerima upah, TK penerima upah ini disebut sebagai pekerja formal. Ini sudah disetujui ditingkat kementerian , manfaatnya sudah kami tingkatkan sesuai kebutuhan medis , santunan berupa uang dan beasiswa ini juga hal yang baru dan ini juga sudah disetujui ditingkat Kementerian.

Kemudian kami menambahkan program *return to work* atau kembali bekerja bagi yang mengalami kecelakaan, ini juga sudah disetujui ditingkat kementerian. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat promotif dan preventif untuk menurunkan kecelakaan kerja, ini juga sudah di setuju ditingkat kementerian.

Jadi untuk program JKK ini peraturan pemerintahnya hanya tinggal kita ditandatangani oleh presiden, saat ini berada pada Kementerian terkait yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Untuk program JKM iurannya tidak berubah sama seperti yang sekarang berjalan yaitu 0,3% sedangkan TK bukan penerima upah ini juga untuk menjawab pertanyaan Pimpinan Sidang tadi apakah pekerja informal ikut serta? pekerja informal ikut serta dalam program BPJS tapi ada pentahapan kepesertaannya berdasarkan kemampuan pekerja informal tersebut.

Nah untuk tahap pertama pekerja informal tersebut kalau ikut serta program JKM hanya membayar Rp. 6.800,- per bulan dengan manfaat sampai dengan 24 juta jika mengalami kematian dan mendapatkan beasiswa 12 juta untuk anak-anaknya. Saya kira inilah asuransi sosial atau jaminan sosial, manfaat dan iurannya itu sangat signifikan perbedaannya. Kemudian untuk program jaminan hari tua iurannya adalah 5,7% tetap dan ini sudah disetujui ditingkat kementerian.

Lalu untuk manfaat, nah untuk manfaat ini sebagaimana kami utarakan tadi ada manfaat-manfaat baru yang kami usulkan untuk diterima pekerja yaitu pinjaman uang muka perumahan, kredit kepemilikan rumah dengan subsidi dan peserta boleh mengambil sebagian dari dana JHT nya setelah 10 tahun. Untuk elemen-elemen ini masih dalam tahap pembahasan ditingkat Kementerian antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan juga DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

Demikian juga untuk tambahan manfaat yang kami usulkan yaitu bagaimana tata cara investasi, bagaimana tata cara pemberian persyaratan manfaat tersebut nantinya akan diatur dalam peraturan menteri ini masih dalam tahap pembahasan. Berikutnya adalah program jaminan pensiun, untuk program jaminan pensiun ini semua substansi masih dalam pembahasan ditingkat Kementerian, kami hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan yang pertama substansi pentingnya adalah usia pensiun menjadi 56 tahun, iurannya 8%, 5% disediakan oleh pemberi kerja dan 3% oleh pekerja. Manfaatnya adalah manfaat pasti sebagaimana Undang-Undang lalu formulanya sebagaimana kami utarakan tadi 1% kali masa iur kali rata-rata upah tertimbang selama masa iur, yang berhak mendapatkannya adalah bisa karena pensiun cacat, pensiun janda, pensiun anak maupun orang tuanya bagi kaum lajang.

Lalu skema pemberian manfaatnya juga masih dalam tahap pembahasan, jika dia menjadi peserta di bawah 15 tahun maka akan mendapatkan secara lamsam sekaligus. Kemudian masih juga dalam hal nilai manfaat, ini masih dalam pembahasan yaitu minimal manfaat yang diterima kalah 0,15 kali PTKP, PTKP ini Pendapatan Tidak Kena Pajak dan maksimum 6 kali PTKP ini juga masih dalam pembahasan di Kementerian terkait.

Bagaimana kesiapan kami untuk operasi penuh di 2015 ini? Kami sudah bekerjasama dengan berbagai lembaga, kami sudah menandatangani PKS dengan berbagai lembaga sebagaimana terlihat di sini, ada dengan Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi UKM, Kominfo, Imigrasi bahkan juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami juga sudah bekerjasama dengan APINDO, bekerja sama dengan KADIN di luar itu kami juga bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah hanya saja ini belum semua pemerintah daerah kabupaten kota bekerja sama dengan kami, dari jumlah 400 yang ada sekarang adalah 466 institusi yang sudah bekerjasama dengan kami. Jadi diharapkan sebelum 1 Juli nanti kabupaten/kota yang belum bekerjasama sudah bisa bekerja sama dengan kami.

Untuk operasionalisasi program-program tersebut maka ada yang disebut dengan pentahapan kepesertaan artinya pekerja seperti apa yang mandatori, pekerja seperti apa yang boleh bertahap? Sebagaimana tertera ditayangkan itu pekerja dan pemberi kerja yang masuk dalam skala besar itu wajib ikut serta di 4 program, skala usaha menengah juga wajib di 4 program, usaha kecil hanya 3 program, dan JP pada tahap berikutnya, JP itu jaminan pensiun sedangkan usaha mikro wajib untuk 2 program JKK dan JKM. Sedangkan peserta penerima upah

penyelenggara negara dalam hal ini dalah PNS, TNI dan Polri harus ikut serta tanggal 1 Juli 2015 untuk 2 program JKK dan JKM, sementara pekerja bukan penerima upah atau disebut dengan pekerja informal tadi untuk pemberi kerjanya pemiliknya itu wajib ikut serta di 3 program, JKK, JHT dan JKM sedangkan untuk pekerjaannya seperti nelayan, petani, tukang ojek, pedagang kaki lima wajib itu serta di 2 program JKK dan JKM.

Nah dalam rangka beroperasi penuh itu kami sudah menyiapkan seluruh kesiapan institusi sebagaimana terlihat ditayangkan ini secara ringkas. Untuk segmen peserta, segmen peserta itu adalah siapa saja yang menjadi peserta kami PNS, TNI Polri akan ikut serta untuk 2 program JKK dan JKM. Kemudian pekerja penerima upah yang bekerja dengan gaji untuk usaha besar menengah itu 4 program JHT, JP, JKK dan JKM, usaha kecil 3 program yaitu JHT, JKK, JKM dan mikro 2 program yaitu JKK dan JKM. Ini termasuk juga tenaga kerja asing yang berada di Indonesia sepanjang sudah berdomisili 6 bulan, mereka wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian ada segmen pekerja yang disebut dengan pekerja jasa konstruksi di bangunan-bangunan mereka wajib ikut serta di 2 program yaitu JKK dan JKM, sedangkan bukan bernama upah atau pekerja informal untuk pemberi kerjanya pemilik warung misalnya itu harus ikut serta di 3 program yaitu JHT, JKK, JKM. Kemudian pekerja mandiri dan pekerja lain-lain itu di 2 program JKK dan JKM. Itu yang bersifat wajib sedangkan yang merah itu bersifat *voluntary*.

Untuk bisa menjalankan program itu kami sudah menyiapkan channel-channel atau kanal-kanal baik yang bersifat fisik yang kelihatan maupun yang bersifat virtual atau *non physical*, yang disebelah kiri itu kami sudah menyiapkan kantor cabang sekarang ada 127 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan diseluruh Indonesia, dan di tahun 2015 ini kami membangun 150 kantor cabang baru. Di luar itu kami juga menyiapkan mobil keliling, kami menyiapkan yang namanya PPOB atau *service... office*, kami bekerjasama dengan perbankan sehingga kantor cabang-kantor cabang perbankan itu juga bisa menjadi outlet kami, diluar *physical channel* kami juga membangun yang namanya *non physical channel* atau bersifat elektronik. Kami sudah memiliki yang namanya BPJSTK Mobile ini bisa diakses di handphone, kami sudah memiliki *call center*, kami sudah memiliki BPJS TK SMS, lalu BPJS TK Checking e-registrasi e-payment, e-claim dan sebagainya melalui website kami. Di luar itu kami juga sudah membangun sosial media sehingga informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan bisa di akses melalui facebook, twitter dan bahkan youtube

Dalam konteks tata kelola ada 5 elemen yang kami sudah siapkan, mulai dari bisnis proses, bisnis proses itu meliputi sistem prosedur, peraturan-peraturan internal, mekanisme dan lain sebagainya kami sudah siapkan secara menyeluruh dari aspek kepesertaan sampai aspek pelayanan. Dari organisasi kami sudah membuat organisasi yang baru, saat ini kami memiliki 11 kantor wilayah, kemudian kami memiliki divisi-divisi dan kami memiliki kantor-kantor cabang sampai ketinggian kantor cabang perintis. Di aspek *governance* kami sudah membangun berbagai hal termasuk *whistleblower system*, kami memiliki divisi kepatuhan hukum, kami memiliki *risk management division*, kami memiliki sistem pengawasan internal dan seterusnya.

Lalu untuk membuat organisasi ini menjadi berkelas dunia kami juga memiliki sistem dalam ... manajemennya yang kami sebut sebagai *smart and drive execution*. Bahkan kami juga membangun satu pendekatan baru yang disebut dengan *knowledge management* dimana seluruh kawan-kawan kami bisa mendapatkan pengetahuan melalui akses di portal kami atau website. Di bidang

TI kami sudah menyiapkan data center ada di Serpong dan di Surabaya. Berikut juga DRC atau *Data Recovery Center*-nya . Kemudian kami membangun satu sistem informasi yang kami sebut sistem informasi jaminan sosial tenaga kerja, ini kalau ada peserta di Jakarta mau claim di Banda Aceh bisa , peserta di Papua mau claim di Surabaya juga bisa, sistemnya online diseluruh Indonesia. Kami memiliki data center yang tadi saya utarakan, mengelola saat ini 17,9 data atau 17,9 juta pekerja dan ini memiliki kemampuan untuk mengolah sampai dengan seluruh pekerja 45 juta di Indonesia.

Kami memiliki network secara nasional maupun internasional, BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi anggota *quote a quote* Jamsostek se ASEAN, dan Jamsostek sedunia, di Asian disebut dengan ASSA (*Asian Social Security Association*) dan didunia disebut *International Social Security Association* kami menjadi member dikedua asosiasi itu. Kemudian kami juga sedang membangun *office management system* yang kami sebut dengan *paper less*, jadi tidak lagi banyak menggunakan kertas semuanya melalui elektronik.

Sistem layanan kami juga sudah kami ubah dengan kami sebut Prima yaitu Peduli, Ringkas, Interaktif, Modern dan Aktif kami mengubah kantor cabang-kantor cabang kami layanannya menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Sebagai salah satu contoh kalau jaman dulu claim di Jamsostek bisanya 2 minggu saat ini Insya Alah bisa 20 menit, ada program kami *from two weeks to twenty minute*, jadi kalau datang ke kantor cukup 20 menit sudah dapat diterima claimnya. Dari sisi people kami melakukan standarisasi, kalau bapak-bapak dan Ibu lihat sinar manajemen kami dari belakang baju putih Pak untuk hari Kamis, hari-hari yang lain juga punya seragam , direksi juga begini, kami tidak pakai jas pak, tapi pakai baju hari-hari. Kami menghormati sidang ini maka kami pakai PDH pak, biasanya pakai kemeja biasa saja.

Lalu ada *physical evidence*, kami membangun gedung-gedung baru di seluruh Indonesia. Itu adalah kesiapan kami dalam pelaksanaan operasional penuh 1 Juli 2015 ini. Dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya maka kami mencoba memberikan nilai lebih di tahun 2015 sebagai bukti kesiapan kami menjalankan operasi penuh.

Yang pertama adalah lebih informatif kalau dulu para pekerja mendapatkan informasi setahun sekali melalui *billing* maka sekarang bisa diakses setiap saat untuk cek saldo minta informasi dan seterusnya. Ini sudah kami bangun dalam 2 tahun terakhir. Kemudian manfaatnya lebih, ini sudah kami utarakan tadi ada beasiswa, ada uang muka perumahan, dan juga akses kepada kredit perumahan. Kemudian biaya transaksinya lebih murah karena lebih banyak channel-channel yang kami miliki. Kemudian dari sisi pengelolaannya *Insya Allah reliable* , kami sudah membangun data center baru kami punya sistem *risk management* dan juga aplikasi-aplikasi yang kami sebut sistem informasi jaminan sosial tenaga kerja. Lalu dengan sisi pelayanan kami membangun satu konsep baru yang disebut dengan Prima mulai dari gedung kantornya, prosesnya dan *people*-nya . Gedung kantornya *Insya Allah* lebih nyaman, lebih *cozy*, *customer service*-nya lebih manis-manis pak, kemudian prosesnya lebih cepat, dan *people*-nya lebih ramah, lalu mudah diakses seperti yang tadi kami utarakan.

Secara umum itulah kesiapan kami dalam menjalankan operasional penuh penuh baik dari sisi institusi maupun dari regulasi. Hal-hal lain tentu mohon arahan dari Bapak Pimpinan maupun Bapak-bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Kami akhiri di sini, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Saudara Dirut telah memberikan penjelasan yang cukup komprehensif. Kelihatannya kalau dibandingkan dengan BPJS Kesehatan itu ada 2 yang menonjol yang pertama BPJS tenaga kerja tidak menerima PBI ya dan kedua kemungkinan tekor ya tidak lah ya dibanding dengan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan sekarang sudah tekor. Karena biaya kesehatan lebih besar dibandingkan dengan premi atau PBI yang diterima.

Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Kita masuk pada bagian yang berikutnya adalah pendalaman, pertanyaan, saran-saran dan lain sebagainya dari anggota komisi yang terhormat.

Yang pertama saya mulai dari sebelah kanan dimulai yang terhormat Ibu Okky Askowati dari Fraksi PPP, kami persilakan.

**F-PPP (Dra. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.Si)**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Bapak Elvyn selaku Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran yang saya hormati.**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

Terima kasih pak untuk paparannya dan kalau saya amati rasanya kalau dibandingkan dengan BPJS Kesehatan BPJS TK ini saya rasakan lebih siap begitu untuk menghadapi dioperasikannya nanti 1 Juli 2015 *Insy Allah*. Dan saya berharap bahwa tiga RPP yang sedang diselesaikan dan revisi itu bisa segera selesai karena pengalaman di BPJS Kesehatan PP nya itu baru selesai ketika di masa *injury time* wah jadinya gedebak gedebuk begitu.

Nah terkait dengan PP itu yang sedang diselesaikan saya ingin tahu mengenai PP yang untuk jaminan pensiun, disini kalau saya baca bahwa jumlah iurannya itu sebetulnya belum mencapai kesepakatan, kalau substansinya sudah. Nah saya ingin tahu sampai sejauh apa kesepakatan dari para *stakeholders* terkait dengan jumlah iuran untuk jaminan pensiun.

Kemudian juga hasil dari kajian KPK, KPK mendapatkan bahwa bisa terjadi *conflict interest* begitu antara dewan pengawas dengan Direksi BPJS TK karena gaji dari dewan pengawas itu juga ditentukan dalam rencana anggaran tahunan badan yang juga dikelola oleh Direksi BPJS TK. Sehingga disini KPK memberikan saran agar adanya pihak ketiga untuk melakukan *review* rencana anggaran tahunan badan. Saya ingin tahu bagaimana respon bapak terkait dengan hal ini begitu, dalam arti kata transparansi dan keterbukaannya terkait dengan rencana tahun anggaran itu. Dan saya Pak Dirut mengenai beasiswa yang otomatis diberikan kepada anak peserta ketika peserta itu meninggal begitu.

Pertanyaan saya berapa anak yang akan dijamin untuk menerima beasiswa ini kalau JKN itu kan 3 anak yang ditanggung begitu ya, dalam hal ini berapa anak yang ditanggung dan usia berapa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut serta sampai pendidikan tingkat begitu. Lalu saya juga tertarik dengan jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian yang menyasar pekerja bukan menerima upah. Di sini dikatakan besaran iuran tidak menggunakan presentase tapi nominal sekitar 6.000 sampai 6.500 untuk satu orang setiap bulan. Pertanyaan saya apakah penentuan nominal ini berdasarkan pendapatan yang diterima oleh pekerja bukan menerima upah ini, maksudnya kalau dia pekerja bukan penerima upah tapi gajinya puluhan juta apakah sama dengan mereka yang pekerja bukan penerima upah yang gajinya katakanlah 3 juta seperti itu, saya ingin tahu dari mana angka 6.000 dan 6.500.

Ini yang juga saya soroti yaitu mengenai pembangunan dari Rusunawa maupun Rusunami dan juga *landed house* yang menjadi programnya BPJS TK. Di sini kalau saya baca pembangunannya sebagian ada yang ditangani BPJS TK secara langsung dan sisanya bekerjasama dengan pihak lain, apakah kemudian BPJS TK ini menjadi developer juga begitu, mohon penjelasannya Pak. Ketika kemarin saya Reses Pak Elvyn ada yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan ini melakukan COB (*Coordination of Benefit*) dengan Jasa Raharja, kurang baik lah begitu dalam arti kata ketika seorang mengalami kecelakaan ke rumah sakit maka rumah sakit mengatakan Jasa Raharja yang menanggungnya, sementara Jasa Raharja hanya menanggung sampai 10 juta selebihnya tidak.

Nah saya ingin menyoroti bagaimana kemudian jaminan kecelakaan kerja yang dimiliki oleh BPJS TK ini dengan BPJS Kesehatan, kan disini dikatakan kalau dia nggak ikut jaminan KK dari BPJS TK maka *monggo* BPJS Kesehatan, tapi kalau dia ikut maka dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja dari BPJS TK tapi seberapa jauh jaminan KK ini akan meng-cover begitu.

Dan yang terakhir saya tidak melihat, mungkin saja saya salah tapi sampai saat ini saya tidak melihat angka-angka kepesertaan yang menjadi target dari BPJS TK ini karena menurut hemat saya kalau memang itu ada mungkin kerjanya bisa lebih fokus dan saya tidak melihat mengenai angka-angka itu.

Itu saja pimpinan, terima kasih.

***Wabilahitaufiq Walhidayah,  
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Bapak Ali Mahir dari Fraksi Partai Nasdem.

**F-P-NASDEM (Ir. ALI MAHIR, MM) :**

Terima kasih Pimpinan.

Nama saya Ali Mahir A-14 dari daerah pemilihan Jawa Tengah II, Kudus, Demak dan Jepara dari Fraksi Partai Nasdem.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang terhormat Bapak Pimpinan dan rekan-rekan Komisi IX,  
Yang terhormat Bapak Elvyn kita ketemu yang kedua mungkin ya,  
Dirut BPJS Ketenagakerjaan.**

Terima kasih, paparan yang cukup jelas . Saya ingin sedikit bertanya atau mungkin bisa diperjelas ya, bahwa program BPJS Ketenagakerjaan kan saat ini yang sudah berjalan ada tiga , saya anggap tiga karena yang jaminan hari tua sedang ya , oh pensiun ya maaf. Jadi jaminan hari tua, kematian, kecelakaan kerja sudah dan yang pensiun sedang. Saya ingin mulai mungkin yang pensiun agak kebelakang dulu.

Begini bapak dari keterangan dari Direksi yang saya baca dan saya ketahui itu tercatat ada sekitar 16 sekian juta pekerja yang itu sudah masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Cuma yang ingin saya tanyakan apa itu jumlah begitu itu dari bekas Jamsostek peserta baru ataupun peserta yang lama saja? Mungkin kalau itu masih dari peserta lama istilahnya bertransformasi saja itu mungkin kita bisa pikirkan kinerja itu sendiri begitu . Mungkin bisa lebih jelas sedikit bayangan lah berapa persen sih penambahannya? Kalau hanya sekedar 16 sekian juta beralih menjadi juga tidak jauh dari itu perlu kita tingkatkan kinerja itu, kira-kira itu yang pertama.

Selanjutnya apakah dari perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan kita ini ya ataupun pemberi kerja yang belum banyak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kalau itu masih belum kira-kira kendala apa itu? Karena kalau kita lihat pekerja di Indonesia jumlahnya mungkin sudah 40 sekian juta ya kalau tidak salah saya baca. Jadi ini kenapa ini? atau masih baru ? BPJS ini masih baru mungkin ya, kalau masih baru berarti perlu sosialisasi yang agak cukup gencar. Karena tadi juga disebutkan bahwa tenaga penunjangnya cukup bagus ya tinggal efisiensinya. Atau juga mungkin ada kendala kalau pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan instansi apa itu Kepala Daerah, Bupati ataupun apa sehingga kadang-kadang seakan-akan ada rasa lepas tangan begitu oh itu urusan mereka ini urusan saya, ini mohon jangan terjadi di daerah. Karena sayang sekali ini program yang cukup bagus dan saya lihat kayaknya sudah lebih siap dan instansi BPJS Ketenagakerjaan ini jauh lebih siap saya pikir.

Kemudian BPJS Ketenagakerjaan menargetkan peserta 20 sekian juta hingga akhir 2015 itu yang saya baca, kalau salah mohon dikoreksi pak ya, 22,3 apa 22,7 begitu ya. Nah mengapa targetnya kok cuma segitu saya katakan cuma karena kita tahu bahwa tenaga kerja kita sudah di atas 43 juta itu, harian maupun yang yang tetap ya. Oh lebih mungkin ya, harian sudah 12 juta kalau tidak keliru ya. Dan sumber BPJS sendiri itu mengatakan sudah 11,5 juta yang harian, kalau saya tambahkan itu sudah diatas 50 juta itu pak. Ya saya nggak bermain angka tapi ini sebagai gambaran saja, mungkin bapak bisa lebih perjelas mengapa baru kurang dari 50% ya kalau dari 22,3 sementara sudah di atas 50 juta peserta kita begitu.

Satu lagi tambahan untuk yang jaminan pensiun karena akan dilaksanakan tadi dikatakan Juni apa Juli gitu ya mungkin 1 Juli kalau tidak salah ada tarik menarik antara pemberi kerja dan pekerjanya sendiri kisaran iuran pensiun itu bisa sekitar 8%, sementara pemberi kerja 5% itu masih banyak yang merasa keberatan , ini di lapangan. Mohon maaf, sebagai catatan saja saya pernahlah memimpin

sedikit perusahaan kecil begitu ya, itu setelah kita ajak bicara Direksi itu berat 5% itu . Kami mohon bapak nanti bisa memberi penjelasan ataupun mungkin data yang lebih konkrit . Kalau memang itu berat ya menurut kami silahkan lah ada kajian yang mendalam mungkin sosialisasi kepada pihak pemberi kerja terutama yang 5% itu tadi.

Saya pikir Bapak Pimpinan dan Bapak Elvyn mohon bisa diberikan penjelasan seperlunya untuk bahan-bahan kami selanjutnya.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih , ini masih dari Pak Ali, tadi Pak Ali Mahir sekarang Bapak Ali Taher beda-beda tipis, Pak Ali Taher dari Fraksi PAN kami persilakan .

**F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH.):**

***Bismillahirrohmanirrohim***

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan Rapat dan teman-teman Anggota sekalian dan rekan-rekan dari BPJS Ketenagakerjaan.**

Saya Mohamad Ali Taher Parasong dari Fraksi PAN Nomor 495. Saya kira persentasi hari ini bagus sekali, komprehensif, fokus dan informatif terima kasih. Saya mencoba mencerna satu-satu tetapi hanya beberapa yang perlu saya ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam lagi. Pertama ada penambahan 150 tadi Pak Direktur 50 kantor ya, kantor cabang itu kira-kira berapa tenaga kerja yang harus diserap di situ, dan apakah sudah dipertimbangkan betul efisiensi dan efektifitasnya karena membuat kantor baru itu sama dengan investasi cukup besar sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, IT, biaya dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk menambah tenaga kerja ya senang saja kita sebagai DPR itu kan semakin banyak orang kerjakan semakin senang dan bapak-bapak bisa mendapatkan barokahnya, DPR bisa mendapatkan dukungan moril dari para peserta.

Yang kedua kira-kira jumlah perusahaan tadikan jumlah 16 juta itu kan anggotanya berapa si jumlah institusi perusahaan yang telah menjadi anggota dari BPJS Ketenagakerjaan secara institusi. Dari total itu berapa yang tidak ikut dan kenapa tidak ikut, karena ada kendala-kendala teknis itu tidak seluruh pemberi kerja itu memberikan apa namanya menjaminkan pekerjaanya. Saya ini tinggal di Tangerang, Dapil Tangerang meskipun asli NTT saya hampir setiap saat itu berinteraksi dengan teman-teman di tenaga kerja, saya tahu persis dilapangan.

Kemudian yang saya terharu sekali itu tadi halaman 2 ada produk baru jenjang pendidikan jika ada kematian , ini salah satu produk yang saya kira luar biasa itu bagus. Jadi agar bisa memberikan kepastian kepada masyarakat ya . Manfaat baru JKM, beasiswa pendidikan anak untuk setiap peserta yang meninggal dunia pertanyaannya jenjang pendidikan sampai mana? SD kah? SMP, sampai perguruan tinggikah dan lain sebagainya, ini perlu penjelasan supaya ekspektasinya tidak berlebihan dari masyarakat , jangan sampai nanti ketika usia



masih muda pekerjaanya meninggal meninggalkan anak kemudian seolah-olah sampai perguruan tinggi misalnya itu perlu penjelasan dan kepastian. Rakyat ini kan khawatir ya, kalau sosialisasi tidak mantap itu nanti itu menagih janji itu di masyarakat Pak Ketua, jadi perlu kepastian yang besar.

Kemudian produk lain itu saya kira perlu juga pendalaman yaitu pekerja nonformal tadi dengan iuran 6.000 berapa itu 6.800, nah ini maksudnya termasuk apakah nonformal itu pembantu rumahtangga? Atau mau seperti apa? Apakah juga misalnya saya kebetulan ini mengurus Yayasan Muhamdyah banyak guru yang masih honorer, itu kalau dulu waktu saja Wakil Direktur Rumah Sakit itu hampir semua pegawai kita masukan di Jamsostek termasuk saya juga termasuk Jamsostek. Dan memang pelayanan waktu itu begitu saya pensiun itu nggak sampai 20 menit memang, datang serahkan tunggu keluar duit luar biasa. Tapi yang saya maksud inikan banyak guru-guru yang itu juga mereka juga kerja, ribuan guru itu juga di madrasah-madrasah yang menjadi pekerja tapi tidak ada kepastian apakah mereka perlu juga bisa jangkauan menjadi BPJS Ketenagakerjaan sampai kesitu apa tidak? Karena ini penting sekali supaya guru yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat yang begitu hebat, pahlawan tanpa tanda jasa itu dan itu ribuan kami tangani sekarang ini tidak di kepastian pak. Honor guru kadang-kadang di Tangerang itu di madrasah-madrasah ada masih yang 100 ribu perbulan, ada 200 ribu.

Kemudian kami menangani marbot, marbot itu ada yang dapat dari masjid 200, 300 dan anaknya 5, anaknya 4 kira-kira apakah termasuk itu? Kalau itu maka barangkali menurut hemat saya perlu ada program yang gak eksklaratif terhadap kepesertaan ini, dan itu menjadi suatu hal yang sangat bagus sekali menurut saya kalau seandainya itu yang dimaksud.

Saya kira itu saja tambahannya, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Ali. Selanjutnya yang terhormat Pak Ketut Sustiwawan kami persilakan.

**F-PDIP (Ir. KETUT SUSTIAWAN) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Dirut BPJS Tenaga Kerja dan jajaran.**

Saya Ketut Sustiwawan A-150, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Barat I, kota Bandung kota Cimahi.

Terima kasih paparannya, saya ingin memberikan pendalaman terhadap beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kesiapan BPJS TK sungguhpun baru di nanti 1 Juli 2015, namun saya melihat di lapangan dan juga dari pengamatan ketika Reses saya sudah berkunjung ke Kanwil di Jawa Barat saya kira sudah melakukan

progress yang cukup baik. Namun demikian ada beberapa hal mungkin yang ingin sampaikan .

Pertama terkait dengan transformasi Jamsostek ini ke BPJS Tenaga Kerja ini. Jadi saya ingin mendapat penegasan penjelasan bahwa pengalihan aset dan segala hal yang terkait dengan transformasi ini sudah berjalan dengan baik termasuk mungkin kita diberikan informasi terhadap aset awal dari BPJS Tenaga Kerja ini nanti. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penerbitan peraturan pelaksana, jadi ada saya ingin menyoroti 2 RPP yang masih dalam proses pembahasan terutama yang terkait dengan besaran iuran dan manfaat.

Jadi ini mohon sekali lagi dimana proses harmonisasi terhadap ini apakah sudah bisa berjalan dengan melibatkan *stakeholder* yang ada terutama tadi soal besaran iuran tadi, berapa yang ditanggung oleh pemberi kerja dan berapa oleh pekerja jadi itu. Yang paling penting khususnya adalah untuk sektor informal , jadi ada usaha kecil, ada usaha mikro. Jadi saya kira ini perlu mendapat sosialisasi yang lebih baik karena memang inilah persoalan juga yang harus kita hadapi di lapangan persoalan sosialisasi, terutama hal yang terkait dengan usaha mikro dan kecil ini, kalau yang menengah besar saya kira sudah sebagian besar sudah masuk bahkan juga penahapan kepesertaannya sudah jelas, saya kira yang perlu dilakukan adalah terhadap usaha kecil mikro dan khususnya yang sektor informal. Saya kira yang disebut dengan kepesertaan secara mandiri ini untuk di Jawa Barat yang saya amati di kota Bandung khususnya itu cukup besar juga animo kepesertaannya, jadi saya kira nanti yang terkait dengan jaminan atau manfaat pensiun dan hari tua ada usulan barangkali bisa lebih menarik dari ... yang sekarang ini diberikan. Jadi saya kira tadi belum disebutkan berapa ... .

Nah yang terakhir soal investasi , investasi yang dilakukan terhadap aset-aset ini kan sangat berbeda dengan BPJS Kesehatan, kalau BPJS Kesehatan diberikan dananya untuk ada PBI kemudian bisa tekor tapi saya kira kalau BPJS TK ini rasanya tidak ada kata ekor bahkan mungkin investasinya akan berkembang terus . Nah saya ingin tahu investasi terhadap aset-aset BPJS TK yang sudah dilakukan selama ini termasuk juga adanya ikatan dengan asuransi lain, re asuransi maksud saya.

Saya kira itu saja Pimpinan. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Ketut. ‘

Selanjutnya yang terhormat Bapak Djoni Rolindrawan.

#### **F-PG (CAPT. H. DJONI ROLINDRAWAN, SE, MMAR, MBA) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi IX,  
Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan jajaran.**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Tadi disinggung ada mengenai investasi, saya ingin lebih mendalami di pengelolaan investasi Pak Elvyn. Jadi apakah setiap program sekarang ini kan ada 3 program yang sedang jalan kemudian nanti ada program jaminan pensiun, apakah pengelolaannya itu dipisah antar program atau jadi satu pool saja begitu. Kemudian alokasi sekarang itu seperti apa? Dan imbal hasil 5 tahun terakhir kira-kira seperti apa gitu. Kemudian imbal hasil berapa dan hasil pengembangan yang dibagikannya kepada peserta itu seperti apa gitu.

Kemudian dulu ada dibidang dana tidak bertuan tapi saya dengar agak berkurang sekarang, ya kan sebetulnya bukan tidak bertuan karena memang apa namanya sebetulnya harusnya ada nama-namanya hanya tidak, sulit mungkin untuk dicari seperti itu gitu ya. Nah itu dalam 3 bulan terakhir ini apakah sudah berkurang, seberapa besar berkurangnya.

Kemudian saya kira itu dulu pak, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Djoni. Selanjutnya Pak Suir Syam kami persilakan.

**F-GERINDRA (dr. H. SUIR SYAM, M.Kes. MMR):**

Terima kasih. Apa yang akan saya tanyakan sudah ditanyakan teman sebelumnya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Suir.

Selanjutnya yang terhormat Pak Hang Ali, kami persilakan. Pak Hang lagi keluar ya? Ya saya kira berikutnya yang terhormat Ibu Siti Masrifah kami persilakan.

**F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA):**

Ya terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan seluruh sahabat Komisi IX,  
Dan juga yang kami hormati Dirut BPJS TK dan seluruh jajaran yang hadir  
dalam forum ini,  
Bapak Ibu dan Hadirin yang kami hormati.**

Nama saya Siti Masrifah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor Anggota A-77 dapil Banten III Tangerang Raya. Sebelumnya saya menyampaikan

*apreciate* terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Dirut BPJS TK ini, karena banyak hal inovasi yang sudah disampaikan beberapa program penambahan dan lain-lain saya kira ini adalah hal yang bagus. Tapi ada beberapa hal yang ingin dan kami cermati atau kami tanyakan kepada pihak Dirut BPJS TK ini.

Yang pertama beberapa bulan yang lalu KPK pernah merekomendasikan kepada Direksi dan Dewan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk membuat kebijakan agar melibatkan pihak eksternal dalam melakukan *review* rencana anggaran tahunannya. Saya ingin tahu sampai sejauh mana selama ini pelibatan pihak external ini yang sudah dilakukan oleh BPJS TK.

Kemudian yang kedua masih banyak aturan yang hingga kini belum rampung dibahas, hal ini menimbulkan keraguan akan kesiapan instansi BPJS TK untuk beroperasi. Tadi sudah disampaikan sudah ada beberapa peraturan atau aturan yang saat ini sudah sampai ke pemerintah hanya tinggal ditandatangani ya. Mudah-mudahan ini segera akan bisa diselesaikan dan *Insyah Allah* tidak ada keraguan lagi, Saya ingin ingin terus tetap dikawal dan tetap melibatkan beberapa yang terlibat pembahasannya itu.

Kemudian yang ketiga ada program pensiun perusahaan-perusahaan yang mengikuti program pensiun sukarela, nah saya tanya kepada BPJS TK Dirut dan seluruh jajaran masih diwajibkan perusahaan yang sudah mengikut asuransi atau program pensiun sukarela ini untuk masuk di BPJS, itu yang ketiga.

Dan yang terakhir ada beberapa tadi sampaikan oleh teman-teman lama bahwa besaran iuran yang akan ditetapkan ini masih menjadi polemik ya 8% seperti itu, 5% ke perusahaan 3 dikenakan kepada pekerja ini ya, saya kira Pemerintah akan mengalami atau menemui persoalan nantinya untuk pendanaan ini.

Karena itu sekali lagi kami mohon kepada BPJS Ketenagakerjaan agar tidak memberatkan pengusaha atau perusahaan dalam hal besaran nilai iur persen tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya kira itu yang lain-lain sudah ditanyakan oleh teman-teman, mudah-mudahan hari ini semua bisa terjawab dan *Insyah Allah* kalau kami turun ke Dapil kami bisa menyampaikan itu kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini menanyakan itu.

Terima kasih.

***Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq,  
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Pak Hang Ali. Kami persilakan.

**F-PAN (HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, SH) :**

Terima kasih pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh jajaran.**

Saya Hang Ali Saputra Shah Pahan A-499, Fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Kalimantan Tengah.

Sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu cuma saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Pertama tentunya saya minta kepada kepada BPJS Ketenagakerjaan , jajaran direktur utama dan seluruh jajaran direksinya beserta seluruh karyawannya agar bagaimana *mindset* kita BPJS Ketenagakerjaan ini beda dengan Jamsostek. Kalau Jamsostek itu masa lalu BPJS Ketenagakerjaan ini kan sudah kita buat sebagai pelaksana jaminan sosial ketenagakerjaan, melaksanakan amanat Konstitusi untuk para tenaga kerja kita baik formal maupun non formal. Tapi kelihatannya sementara ini masih banyak hambatan-hambatan untuk menuju ke arah yang demikian. Kenapa saya katakan banyak hambatan-hambatan? Pertama saya melihat seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu masih dibatasi dengan usia, sedangkan kita tahu yang namanya orang bekerja secara formal mungkin 55 sampai 56 tahun tapi kalau yang namanya non formal itu yang 70 tahun pun masih ada mencangkul di sawah. Pekerja formal setelah usia 55 tahun masih ada bekerja juga selama dia masih hidup, karena tipikal masyarakat kita setelah usia pensiun itu masih banyak yang harus bekerja untuk memenuhi hajat hidup dan tanggung jawab terhadap keluarga.

Tapi kalau dilihat daripada pelaksanaan sekarang ini usia 55 sret selesai jaminan kematian, kecelakaan kerja sudah tidak lagi sehingga begitu usia 55 lebih satu hari dia meninggal sudah tidak terproteksi lagi. Padahal anak-anaknya masih banyak yang masih belum mandiri dan sebagainya, ini perlu kita pikirkan. Pertanyaan saya apakah orang miskin itu tidak bekerja apakah orang miskin itu tidak bisa mati , kalau kesehatan perlu PBI kalau ini saya katakan juga perlu PBI, bantuan iuran dari pemerintah untuk orang miskin tentang kematian dan kecelakaan kerja itu harus karena sudah miskin, meninggal, meninggalkan keluarga yang dalam keadaan yang lebih tidak mampu lagi super miskin jadinya. Ini pemerintah harus turun tangan, inilah amanat Konstitusi kita jangan kita membiarkan orang miskin kita menjadi semakin terpuruk.

Jadi mungkin apa yang saya sampaikan beda dengan teman-teman karena saya katakan demikian filosofi daripada badan penyelenggara jaminan sosial dibentuk dulu dan kebetulan saya sebagai salah seorang inisiatornya berpikirknya sampai ke sana. Bukan kita hanya ingin mengumpulkan aset BPJS Ketenagakerjaan 179 triliun , saya tidak bangga akan hal itu, yang menjadi kebanggaan kita adalah bagaimana seluruh masyarakat kita bisa terayomi , bisa terjaga , tidak menjadi miskin selama lamanya itu harapan kita, cita-cita luhurnya demikian. Sehingga apabila BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang demikian , dikelola secara bagus dan benar saya mempunyai satu keyakinan 25 sampai 30 tahun yang akan datang bangsa kita akan benar-benar *exist*.

Ini harapan kita, cita-cita kita semoga cita-cita ini bisa tercapai, tinggal bagaimana sekarang inilah kita memulai. Orang miskin semiskin-miskinnnya dia dia tetap bekerja , yang namanya bekerja ada resiko pekerjaan, kalau dia tidak terproteksi bagaimana dia mampu membayar iuran, sementara untuk makannya saja masih dapat subsidi dari pemerintah, katakanlah ada Raskin dan sebagainya. Untuk kesehatannya dapat subsidi dari pemerintah, begitu dia mengalami kecelakaan kerja karena ketidakmampuan membayar iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian maka keluarganya akan semakin susah , akan semakin sengsara.

Jadi kalau saya berkesimpulan ini perlu dipikirkan dan dibicarakan ditingkat hal yang lebih bagaimana supaya pemerintah punya pemikiran, langkah-langkah untuk menyelamatkan anak bangsa. Masalah risiko fiskal dan sebagainya itu urusan yang berkuasalah urusannya memikirkannya, nah ini yang harus kita lakukan. Karena saya katakan tadi orang miskin pun bekerja dan mereka pasti mati. Usia jangan dibatasi sampai dengan 55, kalau dibatasi sampai dengan 55 itu namanya habis manis sepah dibuang, begitu dia selesai lolos sampai masa pensiun 55, umur 70 meninggal atau umur 56 meninggal maka akan terlunta-lunta yang ditinggalkan. Sementara sekian tahun mereka sudah membayar iuran-iuran yang menjadi kewajiban selama mereka bekerja.

Selanjutnya saya melihat *roadmap* untuk dari BPJS Ketenagakerjaan ini untuk pekerja formal tahun 2018 sasarannya 80% sementara untuk yang non formal cuma 5%, ini saya tidak melihat keseriusan untuk menggarap ya katakanlah fungsi sosial sebenar-benarnya itu yang ada dimana? Kalau para pekerja formal relatif lebih sejahtera dari pada yang non formal, tujuan kita ini ingin menyelamatkan seluruh masyarakat kita atau hanya menyelamatkan yang kita perkirakan akan selamat? Kalau yang formal relatif lebih sejahtera saya katakan dan sebenarnya harapan kita kalau sampai tahun 2018 itu janganlah dibuat angka 5% Pak, karena saya katakan itu terlalu kecil. Disamping itu juga nanti, ini nanti kedepannya sama seperti BPJS Kesehatan pada saat mereka membuat *roadmap* tahun 2014 targetnya 121 juta, saya sudah wanti-wanti mengingatkan jangan 121 juta itu terlalu kecil karena apa, momentum.

Saya sudah berulang kali mengatakan momentum bahwa begitu ini diperkenalkan sebagai suatu produk yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat tidak bisa dicegah masyarakat untuk mendaftar, begitu ternyataantisipasi kurang orang mendaftar pun harus antri sampai pakai calo harus bayar kan kelewatan, ini juga BPJS Ketenagakerjaan begitu yang namanya JKM dan JKK mereka tahu manfaatnya saya yakin pak nanti akan banyak masyarakat berbondong-bondong datang dan apakah BPJS nya mampu atau sanggup handle demikian? Ini yang perlu kita pikirkan karena selama ini masyarakat itu sebenarnya ingin tapi mereka tidak tahu dan tidak pernah ada yang menyiapkan hal yang demikian. Mau ikut *insurance commercial* bayarannya mahal, dan mereka tidak punya kemampuan, mau ikut yang demikian ini baru lahir, saya yakin kalau ini sudah jalan ini akan luar biasa animo masyarakat dan tujuan kita ingin bagaimana melindungi masyarakat kita semaksimal mungkin.

Jadi kalau angka 5% itu mungkin perlu direnungkan kembali Bapak, mari kita pelajari bersama apakah karena ternyata BPJS Kesehatan dari target 121 juta pencapaiannya 133 juta lebih, over, bahkan sekarang sampai bulan Maret sudah 140 sekian juta dan ini karena ketidaksiapan provider dan sebagainya akan jadi masalah tapi kalau berbicara dengan jaminan kematian dan ini ini tidak masalah, menanganinya lebih gampang daripada BPJS kesehatan. Nah tinggal bagaimana iuran orang miskin, kurang mampu, saya katakan ini kewajiban negara masuk di sini, nah ini yang perlu dibicarakan. Jangan hanya kesehatan saja PBI jaminan akan kematian juga perlu, karena begitu mereka meninggal yang ditinggalkan kocar kacir, sudah miskin tulang punggungnya patah mau jadi apa?

Saya rasa demikian Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Hang. Selanjutnya Pak Daniel Lumban Tobing kami persilakan.

**F-PDIP (DANIEL LUMBAN TOBING) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati teman-teman dan juga BPJS Ketenagakerjaan.**

Yang pertama di halaman 7 yang buku Bapak ini ini ada beberapa yang saya mohon penjelasan lebih lanjut. Yang pertama itu pengertian *world class social security administration* dan *world class smart financial management* itu maksudnya apa? *Benchmark*-nya itu *world class*-nya itu seperti apa tolong penjelasan lebih lanjut, jadi supaya kita ada satu bahasa. Jadi *world class* itu bisa macam-macam pengertiannya pak ini. Tapi yang Bapak bilang *world class service*, *world class smart financial management*, *world class social security administration* itu yang mana, menunjuk yang mana didalam *benchmark* tersebut.

Yang kedua ini juga dana kelolaan diatas 500 triliun, ini apakah 2018 ini hitungannya seperti apa karena kita yang terakhir saja 2014 itu baru mencapai sekitar 190 triliun. Jadi dalam sekitar 4 tahun ini bisa 500 triliun hitungannya seperti apa dan *how to achieve* 500 triliun.

Yang ketiga mengenai pengelola dana investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini. Bapak mempunyai portofolio itu baik di bidang deposito, surat utang, saham reksadana, properti dan penyertaan. Ini kebijakan daripada BPJS Ketenagakerjaan ini ini berdasarkan jadi landasan hukumnya apa untuk pembagian daripada persentase terhadap portofolio tersebut. Ini tolong dijelaskan dasar hukumnya dan juga kebijakan yang dilakukan dalam penempatan portofolio tersebut.

Nah yang keempat saya juga melihat terutama di dalam penempatan deposito itu selain bank pemerintah BPD bapak juga di bank swasta nasional. Itu bank swasta nasional yang mana saja dan kebijakan ini yang melandasi bapak menaruh deposito dalam bank swasta nasional itu apa? Ini juga ingin kita mendapat penjelasan lebih lanjut. Demikian juga apa namanya investasi di bidang properti, ini juga mohon penjelasan lebih lanjut apakah ini memang mempunyai *multiplier effect* kepada pekerja-pekerja yang selama ini sudah menikmati service daripada BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Masih ada dari anggota, Ibu Amelia baru Pak Imam.

**F-P. NASDEM (AMELIA ANGGRAINI) :**

Terima kasih Pimpinan.

Mohon maaf tadi agak terlambat.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Ketua BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya yang saya hormati.**

Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan singkat saja. Saya ingin mempertegas kembali terkait dengan progres perluasan kepesertaan dimana dalam RPD sebelumnya Komisi IX DPR RI telah meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaannya baik itu dari perusahaan-perusahaan dan pekerja formal dan juga informal. Nah pertanyaannya sudah sejauh mana progressnya saat ini menjelang 1 Juli 2015 , dan terkait dengan kepesertaan ini mungkin untuk kepesertaan dari perusahaan dan pekerja formal agak relatif mudah tadi bagaimana dengan pekerja dari pekerja informal.

Nah selain persiapan kantor kemudian layanan serta supporting SDM , yang dapat diukur jumlah dan sebarannya yang tidak kalah pentingnya saya ingin mempertanyakan adalah bagaimana dengan strategi dan langkah-langkah yang sudah dilakukan terkait dengan kegiatan sosialisasi, edukasi dan advokasi. Dan apa saja yang telah dilakukan untuk target peserta pekerja informal tersebut. Ini penting saya pertegas karena harapan saya BPJS Ketenagakerjaan tidak seperti kondisi pelaksanaan BPJS Kesehatan yang agak semrawut. Demikian.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Selanjutnya yang terhormat Bapak Imam Suroso. Silakan.

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, SH,MM) :**

Terima kasih Pimpinan dan teman-teman Komisi IX yang saya hormati.

**Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya.**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Saya Imam Suroso A-172 dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah III Pati, Rembang Blora, Grobogan.

Pak Elvyn, jadi paparannya tadi menurut saya sudah cukup bagus beserta materinya. Tadi sudah banyak yang ditanyakan teman-teman, di sini saya ingin menanyakan yang kaitannya dengan sosialisasi BPJS ketenagakerjaan. Jadi di dalam rangka memperluas kepesertaan program BPJS TK ini kan harus sebanyak mungkin itu karena ini suatu program pemerintah yang cukup melindungi para pekerja di perusahaan. Jadi disinikan melampaui banyak berbagai kelompok



masyarakat, ada peserta itu dari perusahaan, kemudian dari para pekerja, kemudian dari instansi-instansi lain . Pak Elvyn pertanyaannya sekarang sampai saat ini sejauh mana sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan karena online-nya BPJS Ketenagakerjaan inikan mulai 1 Juli 2015, ini kan belum ini , belum kerja, sosialisasi dan sosialisasi.

Maka nanti tolong disebutkan sejauh mana sosialisasi Bapak terhadap kelompok-kelompok masyarakat itu atau instansi. Kemudian yang kedua bagaimana persiapan daerah-daerah terkait didalam melaksanakan program-program BPJS TK, bagaimana itu persiapan? sudah siap apa belum? jangan-jangan acak-acakan nanti tanggal itu.

Kemudian yang ketiga bagaimana respon perusahaan-perusahaan terhadap BPJS TK ini baik itu perusahaan-perusahaan ditingkat menengah keatas maupun perusahaan-perusahaan itu di tingkat menengah ke bawah, bagaimana apa reaksi dia? Pro? kontra? atau sebagainya, nanti tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Karena ini termasuk program Komisi IX BPJS TK itu , nanti kita bahas bersama , penting soalnya.

Kemudian yang terakhir Pak Elvyn, Pak Kepala BPJS TK kendala-kendala apa yang bapak alami termasuk jajarannya itu di lapangan, apa kendala-kendalanya? Tolong sampaikan pula di sini nanti kita bahas kita rapatkan, kita carikan solusi.

Sementara itu pimpinan, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Yang selanjutnya yang terhormat Bapak Marwan Dasopang kami persilakan.

**F-PKB (MARWAN DASOPANG) :**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang kami hormati Pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi IX,  
Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pak Elvyn dan seluruh jajaran.**

Saya hanya sedikit saja Pak Ketua menambahkan dan mempertegas dari Bang Daniel tadi tentang investasi . Melihat duitnya ini cukup besar dan besarnya duit ini dari buruh. Pertanyaan berikutnya dari investasi atau penyertaan modal , dan seluruhnya seberapa besar efeknya kepada ketersediaan lapangan kerja. Itu satu. Yang kedua mungkinkah kalau investasi ini bisa memberi ruang yang lebar untuk tenaga kerja karena Kementerian Tenaga Kerja pada saat ini sudah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Kalau dihitung itu ribuan arus tenaga kerja yang dikirim itu stop , bisakah duit ini diinvestasikan kesebuah pekerjaan menampung mereka. Saya kira kalau duit yang luar biasa besar ini tidak di penyertaan modal ke bank atau rumah tapi membuat lapangan kerja sehingga tidak lagi moratorium, kita stop tidak lagi ada pengiriman tenaga

kerja. Kalau hitung-hitungannya itu bisa kira-kira kendalanya pak? Kita carikan kira-kira apakah payung hukum atau yang lain-lain.

Kami kira itu saja terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Selanjutnya yang terhormat Pak Ayub Khan kami persilakan.

**F-PD (Drs. AYUB KHAN, M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IX,  
Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan segenap rombongannya.**

Kami cuma sedikit menambahkan dari apa yang sudah ditanyakan teman-teman, yaitu mempertegas terkait masalah besaran iuran pensiun yang sudah apakah 8% ini sudah ditetapkan? Mengingat menurut pakar yang ideal adalah besarnya 15 sampai 17%. Kami tidak berharap kejadian di BPJS Kesehatan nanti terulang kembali di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi besarnya itu apakah sudah di tetapkan dan apa sudah menurut kajian sudah ideal. Itu yang pertama.

Dan seperti yang disampaikan teman-teman tadi kami juga pada Reses ke Dapil dari pengamatan kami banyak pekerja yang masih tidak mengetahui terkait formal swasta khususnya, banyak yang tidak mengetahui terkait masalah BPJS Ketenagakerjaan ini, termasuk di lingkungan DPR, DPD maupun DPR daerah juga tenaga kerja honoraria juga masih belum masuk didalam BPJS tenaga kerja ini mengingat di Undang-Undang BPJS , kepesertaan ini adalah bersifat wajib. Dan juga terkait masalah data yang sudah online apakah juga bisa diakses oleh tenaga kerja kita yang ada di luar negeri dan juga gimana hubungan kerjasama BPJS tenaga kerja dengan rumah sakit-rumah sakit kita yang ada di ASEAN mengingat BPJS tenaga kerja ini adalah juga menjadi anggota organisasi dari negara-negara ASEAN.

Mungkin itu Pimpinan, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Dari anggota ada lagi? Silakan dari meja pimpinan , kami persilakan Pak Azman Abnur

**F-PAN (H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.) :**

Terima kasih Pak.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

Pak Dirut, saya sudah familiar dengan bapak , memang bapak ini saya pikir cocok disini Pak Ketua, ahli keuangan.

Pertama saya ingin konsentrasi hal-hal yang rutin setiap tahun Pak Dirut. Apa yang saya sampaikan ini saya pikir perlu sharing dari BPJS, setiap tahun itu selalu saja pemerintah daerah apakah itu walikota, gubernur, atau bupati itu di bebani dengan masalah UMK , itu kalau sudah mau ambil keputusan itu Pak Dede pernah jadi Wakil Gubernur itu bermacam macam demo, macam-macam masalah selalu timbul. Ada kepentingan pengusaha yang harus dipikirkan, ada kepentingan tenaga kerja yang harus dipikirkan oleh kepala daerah. Nah setelah kita dalam persoalan ini tidak lain tidak bukan adalah titik temu antara kesepakatan tripartit itu antara kebutuhan pokok dengan gaji yang mereka terima.

Nah lalu saya berpikir apa peran BPJS di sini? Karena BPJS ini kita harapkan sebagai support buruh dalam hal kesejahteraan, maka dari itu saya ingin ini konsentrasi ya Bapak kan punya Dirut Investasi , ya tadi sudah disinggung oleh kawan-kawan investasi selama ini kan konsentrasinya layaknya seperti perusahaan-perusahaan yang profit oriented. Nah saya lihat komponen yang paling besar yang mempengaruhi upah minimum itu adalah pertama kebutuhan pokok bahan-bahan pokok, kemudian yang kedua adalah transportasi , kemudian yang ketiga adalah tempat tinggal. Nah ini komponen yang menghabiskan uang buruh itu, maka dari itu kita bicara tempat tinggal saya terima kasih pak saya Dapil Kepri, itu Batam itu jadi contoh Rusunawa, cuma belakangan ini agak kurang pengembangannya, yang sudah ada saja.

Jadi maksud saya kalau bisa ini dijadikan contoh betul , nah bahkan kalau bisa pengelolaannya jangan saya nggak tahu apakah ini dikelola sendiri atau ada *outsourcing* yang mengelola . Layaknya pengelola seperti service apartemen itu pak sehingga buruh itu betul-betul di tinggal di tempat yang nyaman, dan konsentrasi investasi disini saya pikir juga nggak rugi.

Nah maka dari itu saya mengusulkan kalau bisa konsentrasi ke depan investasi di, kalau bisa rumah Rusunawa itu diganti deh namanya pak biar agak keren dikitlah gitu , apa kalau di mahasiswa itu ada namanya *student custle* ya, *student residence*, nah ini kalau buruh ini apa namanya biar buruh itu kalau nyebutkan alamatnya agak bangga dia. Nah kalau buruh dai sebut lu tinggal di mana? saya tinggal di Rusunawa agak turun kelasnya Pak Dirut, mungkin ini perlu kita pertimbangkan untuk diubah namanya. Dan itu cukup berhasil buruh-buruh di Batam itu sangat tertolong dengan itu, itu yang pertama masalah soal investasi di bidang tempat tinggal ya apakah itu Rusunawa apapun namanya. Yang kedua Pak Dirut, kalau kita lihat negara tetangga kita Singapur contoh ya itu Union-nya yang namanya NTUC , dimana-mana setiap sudut di Singapur itu ada yang namanya supermarket NTUC , nah buruh yang belanja di situ itu dapat subsidi dari supermarket itu nah sehingga mereka merasa kalau saya belanja disini bisa bayar iuran kok saya merasa memilikinya ada ya, nah telur dibeli misalnya di supermarket biasa kayak Giant katakan 15.000, disana dia cuma dapat beli 10.000, nah ini saya pikir konsep-konsep yang harus konsentrasi ke depannya usulan saya sehingga setiap sudut manapun di pabrik apakah dikawasan industri BPJS Tenaga Kerja ini punya outlet-outlet seperti itu. Sehingga buruh itu pulang dia memenuhi kebutuhan pokoknya, dia merasa bangga seolah-olah belanja di warungnya sendiri.

Nah karena memang uangnya dia yang diinvestasikan disitu, maka investasi kedepan saya pikir ini perlu masukan buat Pak Direktur Bidang Investasi ini itu coba konsentrasi disitu. Masa kalah sama Giant sih gitu loh, saya pikir modal yang

punya Giant juga nggak sebanyak yang uangnya BPJS sekarang. Jadi coba dibuat seperti itu di samping itu juga melayani public, jadi sehingga orientasinya tidak hanya subsidi tadi juga ada profitnya. Nah kemudian transportasi Pak Dirut, sekarang orang berebutan ya orang ingin masuk di MRT di Jakarta, orang masuk di kereta api sebenarnya banyak lagi kota-kota industri yang lain membutuhkan transportasi seperti ini, mungkin skalanya nggak sebesar Jakarta katakan Bandung kotanya Pak Dede misalnya, Surabaya, termasuk Batam sendiri itu mulai dari sentra-sentra tempat tinggalnya buruh itu itu kalau disiapkan transportasi umum bapak konsentrasi investasi disitu saya pikir ini satu hal yang sangat positif buat buruh.

Nah sehingga terobosan-terobosan yang dilakukan BPJS ke depan betul-betul berorientasi kepada kepentingan buruh juga, tidak yang mohon maaf yang portofolio, kalau nempatin uang di bursa saham itu kan paling gampang nyari duitnya pak dan itu tidak punya multiplier effect yang langsung terhadap buruh. Nah mungkin rencana kerja kapan bisa dimasukkan disatu kajian mudah-mudahan ini menjadi satu terobosan bapak dalam lima tahun kedepan.

Kemudian yang terakhir supaya lebih transparan saya ingin dapat informasi bidang-bidang investasi apa saja pak yang sekadang sudah Bapak masuki dan tentu ini sebagai Komisi IX kita ingin tahu yang sudah jalan sekarang itu bidang-bidang investasi apa saja. Nah kemudian ini ada trend di BUMN sekarang pak bikin anak perusahaan, ada PT habis itu dibawahnya ada PT lagi kemudian ada PT lagi, sehingga tak terjangkau oleh pengawasan. Nah apakah BPJS ini punya anak perusahaan juga?

Nah mungkin itu pak yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Ya terakhir ini gongnya dari Ketua Komisi, silakan Pak Dede.

**KETUA KOMISI IX DPR RI/F-PD (DEDE YUSUF M.E., ST, M.I.PoI) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Elvyn yang saya hormati beserta jajaran direksi dan juga seluruh anggota atau manajemen daripada BPJS, Teman-teman yang saya hormati.**

Mungkin begini Pak, banyak pertanyaan tetapi saya pikir ada hal yang penting. Pertama ini Komisi IX bukan Komisi XI, kalau Komisi XI kita berbicara tentang investasi, penanaman modal, penempatan dana pensiun dan sebagainya. Dalam hal ini Pak Elvyn saya anggap jagonya, artinya dengan *track record* kawan-kawan sangat luar biasa. Tapi ini adalah Komisi IX dimana Komisi IX melahirkan Undang-Undang BPJS Undang-Undang BPJS ini yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34, kira-kira bunyinya begini pak yang pertama bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar

dipelihara oleh Negara. Yang kedua negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Saya sedang berpikir BPJS Kesehatan yang katanya sedang defisit atau Pak Syamsul tadi tekor untuk mendapatkan tambahan 6 triliun saja susah, sementara BPJS Ketenagakerjaan aset totalnya itu 190 triliun, tolong dikoreksi jika saya salah dan jika peserta JHT total mungkin 12 juta pak ya, jika dibayar semua maka BPJS Tenaga Kerja masih punya dana 100 triliun.

Jadi saya pikir saya sangat mensupport apa yang disampaikan Pak Hang Ali tadi, mari kita berpikir tentang saudara-saudara kita, rakyat bangsa Indonesia yang saat ini hidupnya di bawah garis kemiskinan, pemulung-pemulung, orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, petani-petani yang tidak bisa mengakses website atau tidak bisa mengakses IT yang berada di garis kemiskinan apakah BPJS Tenaga Kerja ini bisa membuat sebuah terobosan kalau perlu yang disebut PBI Pak penerima bantuan iuran ini dibayar oleh negara, kita siapkan dari APBN poinnya adalah kecelakaan kerja dan kematian. Kalau ingin berlanjut nanti kepada hari tua oke kita hitung, tetapi saya lihat dari program yang begini baik dan begini bagus kok belum ada yang menyentuh yang disebutkan di dalam Undang-Undang Pasal 34, ini yang saya harapkan Pak. Ayo, *let's make a breakthrough* sehingga dalam kurun 5 tahun lagi siapapun presidennya ya kalau sekarang presiden pasti yang akan ditanyakan bagaimana rakyat saya yang miskin-miskin ini? Sebab kalau pekerja, PNS, TNI Polri ini itu sudah *given* tinggal meneruskan Jamsostek, ini sudah *given*.

Nah yang saya pikirkan Undang-Undang Pasal 34 dan negara punya *tools* dia punya alatnya yaitu adalah bpjs tenaga kerja karena BPJS Kesehatan pak sekarang Pak Fahmi kalau bapak lihat mukanya sudah sudah keriputan karena dia harus berhadapan dengan masalah, sementara BPJS Tenaga Kerja mohon maaf *you look so well* ya. Masih bisa kongko-kongko minum kopi dan sebagainya *its oke* tapi maksud saya ingin mengajak BPJS Tenaga Kerja ini *you have a public service obligation* karena ini adalah milik negara ini bukan BUMN lagi. Dana ini ayo kita maksimalkan buat penolong saudara-saudara kita yang miskin, yang susah, yang terlantar, anak jalanan ayo dong buat programnya dananya ada kok.

Nah ini yang saya harapkan pak ya karena kami di DPR disini pada prinsipnya ingin mensupport Pak Elvyn apapun yang Pak Elvyn ingin lakukan kita support, tapi tolong selamatkan saudara-saudara kita yang tidak mampu tadi. Itu yang pertama pak.

Yang kedua masih banyak kebingungan nama BPJS tenaga kerja dengan BPJS Kesehatan, kalau saya sosialisasi "sudah ikut BPJS belum? sudah, yang kesehatan apa tenaga? memang ada dua ya pak?", nah ini akhir membingungkan masyarakat. Coba pikirkan nama lain lah BP Jamsostek kek, bukan merubah Undang-Undangnya tapi *brand name* nya saja sehingga orang nggak lagi bingung. Nanti orang bilang Pak kita sudah bayar iuran ke BPJS Kesehatan harus bayar pula iuran, nah ini nanti negara yang akan kena seolah-olah membebankan rakyatnya. Makanya saya katakan *policy*nya ya pikirkan nama. Jamsostek ini sudah terkenal namanya hanya karena sekarang sudah berubah ya silakan mau pakai brand name-nya BP Jamsostek, jangan pakai kartu-kartu yang nanti ada nama aneh-aneh lagi. Ya itu yang kedua ya pak ya.

Lalu yang ketiga pak ini ada pertanyaan saya masa pensiun 15 tahun, jadi dia masa pensiun baru dibayarkan jika dia sudah membayar iuran 15 tahun benar

pak ya? Bagaimana dengan pekerja yang saat ini usia sudah 50 tahun? Dia baru ikut 5 tahun kerja dia belum bisa menarik uang pensiunnya, *what is your policy?* Kasihan dong pak, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin usia sudah 50 tinggal sisa 5 tahun lagi dia mau ambil apa? Harus diubah pak tata cara apa yang harus diubah?

Keempat, 5% untuk pemberi kerja kata Ali Mahir Zein itu memang cukup berat, cukup berat artinya ya dia harus menanggung karyawan kan bukan satu, ribuan ya jadi artinya ketika dia harus membayar anggota karyawannya saja yang 2.000 ini keluhan dari beberapa industri pabrik-pabrik terutama di Dapil satu kota Bandung dan Bandung Barat itu banyak pabrik garment yang pabrik garment-nya kadang-kadang sekarang ini sudah berubah menjadi sistim UKM, makloon. Jadi dia karyawannya kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga dan dia juga bilang kalau bayar 5% agak berat Pak. Nah artinya apakah ini bisa kita tinjau kembali masalah 5% ini lalu kemudian juga sosialisasinya juga rasanya belum maksimal, saya pernah ditemani di Bali itu ya lalu saya , nggak ada direksi nggak ada yang temani saya, nggak ada dari direksi ya? Kapan-kapan direksi temani sayalah kita berhadapan langsung dengan rakyatnya . Saya panggil pelayan-pelayan itu, saya tanya " kamu sudah ikut BPJS tenaga kerja belum? belum pak, saya bilang tahu nggak ada sebab tong ada yang informal, saya bilang dengan membayar Rp. 10.000,- anda bisa mendapatkan jaminan disebabkan kecelakaan kerja, dan kematian, wah bagus itu pak" akhirnya banyak yang ikut, tapi ternyata bukan 10.000 saya dengar sudah naik jadi 28.600 6.500? ini ada saya baca di media, di warung-warung kopi katanya sosialisasi dengan iuran 28.600 mendapatkan jaminan kematian 21 juta, meninggal biasa dan 105 juta meninggal karena kecelakaan kerja. Kalau ini agak kemahalan, di media, tapi kalau 6.500 okelah cocoklah.

Artinya pekerja-pekerja yang pegawai restoran, tukang warung, tukang Kopi, tukang cilok, tukang batagor di kampung saya itu banyak yang jualan seperti itu, tukang ojek, apabila dikatakan mau nggak dengan 6.500 anda mendapatkan perlindungan kecelakaan, perlindungan kematian pasti mau , sosialisasinya ajak dong anggota ini. Kita ini kan juga alat negara juga untuk mensosialisasikan, saya nggak mau mensosialisasikan pada TNI, Polri, PNS kepada ini apa namanya konstituen-konstituen kita yang petani, yang nelayan, yang tukang-tukang dagang tadi tolong Pak ya karena kita bermitra . Saya pahan BPJS Ketenagakerjaan tidak memilih mendapatkan APBN sehingga akhirnya ini adalah seperti kayak perusahaan sendiri, nggak bisa begitu. Undang-Undang, kita adalah *public service obligation*, kita adalah mitra. Jadi mohon nanti Pak Direksi semua bagikan nomor handphone bapak-bapak anggota, karena kami juga mensupport program yang baik.

Keempat, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Ketua Pak Asman investasi di rumah susun , rumah sakit khusus pekerja katanya sudah dibangun waktu itu ya di Comal ya yang rumah sakit khusus pekerja Tanjung Priok. Tapi katanya ada aturan nggak boleh rumah sakit harus klinik, oke *no problem* tapi kan industri banyak, silakan bapak bangun lagi di daerah-daerah industri. Ya Pak Ketut itu daerahnya di kota Bandung, saya juga punya di Kabupaten Bandung, mungkin saudara-saudara yang lain, klinik-klinik itu bagus itu Pak, kita support itu karena apa? BOR atau sekarang *Bed Occupancy Rate* ini rumahsakit atau klinik kurang, puskesmas waduh jauh lebih parah deh, anggaran kementerian Kesehatan hanya 50 triliun, anggaran BPJS Tenaga Kerja 190 triliun luar biasa pak. Artinya *you can do a lot*, hanya dengan support, hanya dengan dorongan motivasi kita untuk *lets*

*do something for this country* pasti bisa. Malah saya juga bersyukur kalau besok-besok bapak punya program pembangunan rumah-rumah layak huni buat yang tadi itu yang pekerja-pekerja yang di kampung-kampung, yang di pinggir-pinggir kali itu pemulung dan sebagainya saya pikir bagus sekali. Pak itulah, saya mohon maaf, saya pikir saya tidak ingin mengkoreksi tapi saya ingin membangkitkan semangat juang bapak. Karena saya tahu bahwa BPJS Tenaga Kerja ini adalah alat negara yang luar biasa hebat sekali, tinggal kita lakukan perubahan sedikit. Mungkin itu dari saya, terima kasih sekali lagi.

***Wabillahittaufig walhidayah,  
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

#### **KETUA RAPAT :**

Demikian Saudara Dirut pertanyaan, tanggapan saran-saran dari anggota dan Pimpinan Komisi IX , selanjutnya kami persilakan untuk direspon.

#### **DIRUT BPJS TENAGA KERJA :**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Jika diijinkan seluruh pertanyaan nanti akan kami jawab juga secara tertulis, selain hari ini kami akan respon dari saya maupun dari direksi sesuai dengan yang terkait.

**Bapak Pimpinan yang terhormat beserta Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat.**

Ijinkan saya memulai, merespon barangkali dari yang paling belakang dari pertanyaan Pak Dede Yusuf.

Pertama tentu kami memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Dede dan Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah turut serta mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan. Saya ingat pak yang Bapak sampaikan itu di Bali didampingi oleh Kepala Divisi Komunikasi kami Pak Agus Wahyudi waktu itu, dan melaporkan ke saya tentang betapa mensupportnya Pak Dede disana, sekali lagi atas nama institusi kami mengucapkan terima kasih untuk itu. Beberapa yang ditanyakan Pak Dede tadi tentang peran BPJS TK bisa membantu kaum miskin, yang tadi juga ditanyakan oleh beberapa partai bapak dan ibu yang lain.

Tentu secara prinsip kami sejalan dengan itu pak, kami mendukung apa yang diharapkan bapak dan ibu sekalian tetapi di sisi yang lain mungkin kami harus menyatakan bahwa posisi BPJS Tenaga Kerja adalah sebagai badan penyelenggara yang dalam aktivitasnya harus merujuk kepada seluruh regulasi yang dijadikan referensi untuk akreditasinya. Jadi sepanjang regulasi itu mengharuskan kami dan membolehkan kami tentu hal-hal yang sampaikan tadi akan kami laksanakan. Meskipun demikian Pak Dede khusus tentang kepedulian kami terhadap kaum miskin saat ini kami sedang mengembangkan satu program kalau dulu disebut CSR sekarang kami sebut sebagai TJSL (Tanggung Jawab

Sosial Lingkungan) institusi dan ini sudah kami implementasikan tahun 2015 yaitu TJSL kami adalah dalam untuk membayarkan iuran pekerja-pekerja miskin.

Jadi kami sudah memulai mungkin bapak dan ibu pernah membaca koran kami membayarkan iuran, loper-loper koran di kota-kota besar termasuk di Sumatera, di Jawa dan kemudian kami sekarang sedang memulai untuk membayarkan iuran nelayan-nelayan miskin, dan petani-petani miskin. Tentu ini dengan anggaran yang terbatas karena ini bahagian dari TJSL kami. Tujuannya selain memberikan perenungan juga sekaligus sosialisasi agar para nelayan, petani itu bisa tertarik ikut serta. Kami akan sangat berterima kasih jika kemudian TJSL itu tidak seluruhnya untuk itu pak, jadi TJSL kami ada dalam bentuk beasiswa, ada dalam bentuk membayar iuran tadi. Nilai TJSL itu secara total lebih kurang 12 miliar pak dari anggaran yang akan kami miliki. Nah anggaran ini juga menjawab beberapa pertanyaan bapak ibu yang lain yang menentukannya bukan BPJS TK bukan kami tetapi sesuai Undang-Undang anggaran itu biaya operasional kami harus disetujui oleh Menteri Keuangan, dari anggaran inilah kemudian kita bisa mengalokasikan untuk biaya operasional kami.

Jadi kali lagi untuk klarifikasi kami tidak menentukan biaya operasional kami tapi kami mengusulkan dan usulan itu maksud saya dan hasil yang diputuskan biasanya jauh dibawah usulan pak. Itu realitas yang ada tetapi kami menerima itu sebagai satu lembaga.

Yang kedua kami setuju Pak Dede, kami mentasbihkan diri sebagai *civil servant* tapi istilah kami adalah *entrepreneur profesional civil servant*, kita *civil servant* tapi pengelolaannya secara profesional dan berbasis *entrepreneurship*.

Yang berikutnya tentang nama BPJS Ketenagakerjaan, kami terima kasih tanpa bermaksud merefer yang lalu sebenarnya kami pernah mengusulkan untuk menggunakan nama seperti ini tetapi berbagai pihak berkeberatan, karena istilahnya BPJS Ketenagakerjaan tetapi jika Bapak dan Ibu mendukung, berkenaan tentu kami juga akan menggunakan istilah ini sebagai *brand name* kami untuk melakukan deprensiasi dengan BPJS Kesehatan.

Tentang masa iur pensiun 15 tahun, Bapak Ibu sekalian terhormat ini tertera dalam Undang-Undang . Nah bagaimana dengan pekerja yang mengiur misalnya baru 5 tahun, apakah dia berhak mendapatkan atau tidak? Jawabannya adalah berhak mendapatkan tetapi tidak dalam bentuk monthly payment melainkan Lamsam sekaligus diterima diterima jumlah iuran yang sudah dibayarkan berikut pengembangannya selama menjadi peserta BPJS TK jadi diterima sekaligus pada saat dia berusia 56 tahun.

Mengenai iuran pensiun 8% tadi banyak yang bertanya. Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat. Awalnya kami mengusulkan 15% kepada berbagai pihak ,dalam pembuatan regulasi ini 4 Kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian juga DJSN ditambah dengan kami sebagai pihak yang boleh mengusulkan substansi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Nah kami mengusulkan 15% dari diskusi melibatkan APINDO, melibatkan serikat pekerja dan seterusnya. Posisi terakhir adalah 8% , 5% dari pemberi kerja dan 3% oleh pekerja tetapi ini belum menjadi final karena ada salah satu bahagian dari pihak yang memiliki kewenangan menyusun itu mengusulkan 3% iuran ini Pak.

Jadi *instead of* 8% menjadi 3% tetapi pada kesempatan di forum yang terhormat ini saya ingin menyampaikan berdasarkan kajian kami sebenarnya yang jauh lebih penting adalah manfaat yang akan diterima oleh para pekerja yang jadi peserta program. Kalau iurannya 8% dalam hitungan kami manfaat yang diterima



itu bisa 30 sampai 40% dari rata-rata iuran, rata-rata upah mereka sedangkan kalau hanya 3% atau 5% itu tidak sampai 10% pak. Jadi ada hitungan-hitungan berdasarkan aktuarial dengan menggunakan tingkat pengembangan sebesar tingkat bunga deposito dan dikalikan sekian tahun itu ada manfaat yang akan diterima.

Jadi sementara ini yang masih *reasonable* adalah angka 8%, 5% dari pemberi kerja dan 3% dari pekerja itu akan menghasilkan lebih kurang 30 sampai 40% dari upah rata-rata mereka.

Saya lanjutkan lagi dengan menjawab pertanyaan pak Asman Abnur, sekali lagi terima kasih juga Pak untuk dukungan Bapak. Mohon maaf, hal yang bapak tanyakan itu sebenarnya kami pernah menyampaikan dalam persentasi di RDP tanggal 26 Januari, konsep pengembangan investasi yang kami sebut sebagai total benefit. Jadi terima kasih yang kami sampaikan itu sejalan dengan pemikiran bapak, pemikiran kami tentang total benefit investasi adalah kalau sebelumnya waktu Jamsostek benefit yang diberikan hanya finansial benefit, jadi ini pekerja mendapatkan santunan, mendapatkan manfaat jaminan hari tua, sekarang kami mengembangkan total benefit yaitu meliputi *financial benefit*, *housing benefit*, *transportation benefit*, *food benefit* dan *health benefit*. Lima ini kami sebut sebagai *total benefit*.

*Housing benefit* ini dalam bentuk dua yaitu Rusunawa dan *affordable housing*, ini yang tadi istilah bapak jangan disebut Rusunawa kami sebutnya sebagai *affordable housing* atau rumah terjangkau. Saat ini kami sudah memiliki di Batam, kami sudah memiliki di Jawa Barat dan di tahun 2015 *Insyah Allah* kami akan segera membangun 6 Rusunawa lagi di Medan, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur dan Sulawesi Pak. Kenapa di lima daerah? karena orientasinya adalah kantong-kantong pekerja dimana potensial demand terhadap rumah itu tinggi. Untuk bapak-bapak dan Ibu ketahui pengalaman kami mengelola Rusunawa di Batam itu biayanya hanya Rp. 100.000,- per-bulan perkepala, hanya Rp. 100.000,- setiap unit bisa diisi oleh 4 orang sehingga Rp. 400.000,- per bulan dan hal yang sama akan kami lakukan di tempat-tempat yang lain.

Yang kedua juga terima kasih atas arahan bapak mengenai *food benefit*, kami sudah menjalankan program ini pak secara bertahap, kami bekerjasama dengan berbagai institusi kami sudah punya yang namanya Rajawalimart bekerjasama dengan RNI di mana para pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukkan kartu bisa mendapatkan diskon 10 sampai 15% untuk sembako. Dan kami sekarang sedang dalam pengembangan untuk membangun *virtual outlet*, *virtual outlet* ini akan akan dibangun di setiap pabrik-pabrik dimana para pekerja bisa berbelanja secara online lalu kemudian sembakonya dikirim ke pabrik tersebut dan mereka membayar secara bulanan, kalau bapak-bapak dan Ibu mendukung ini akan segera kita implementasikan dalam bentuk istilah kami *food benefit*.

Yang ketiga *transportation benefit* saya melaporkan juga di forum ini kami baru menyediakan 20 bus di Batam untuk pekerja, gratis Pak. Nah untuk berikutnya selain menyediakan bus kami memberikan akses transportasi, untuk informasi Bapak Ibu sekalian mulai 1 Juli 2015 jika tidak halangan kartu BPJS Ketenagakerjaan akan kami ubah menjadi *smart card* seperti ini *smart card* ini di dalamnya ada chip yang bagi pekerja yang memegangnya bisa menggunakannya untuk diskon naik bus, bisa diskon belanja, dan di dalamnya ada *saving*. Ini adalah terobosan yang Bapak harapkan dari kami dalam rangka membuat kepesertaan lebih modern. *Insyah Allah*, tetapi tentu saja kami harus koordinasikan supaya kartunya nggak tumpang tindih dengan kartu-kartu yang lain. Pak Asman

juga investasi apa saja yang sudah dimasuki? Nanti secara lebih detail saya akan menjelaskan tetapi secara umum investasi kami itu mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dalam PP Nomor 99 itu diatur *do and dont* tentang investasi, kami hanya boleh berinvestasi di lima area di deposito berjangka, di obligasi, di saham, di reksadana, di properti dan penyertaan, terhadap seluruh instrumen itu ada batasan-batasannya maksimum sekian persen di properti, maksimum sekian persen di reksadana, dan seterusnya-seterusnya. Dari PP Nomor 99 itu di internal kami memiliki pedoman pengelolaan investasi yang disiapkan oleh direksi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk saya. Di situ ditentukan kriteria bagaimana melakukan penempatan di bank, tadi pertanyaan Pak Daniel, di bank mana saja kami tempatkan dan apa alasannya.

Kami melakukan kriteria penempatan di bank itu berdasarkan *grading*, di Indonesia ada 137 bank, dan 137 bank itu kita review, kita *grade* menggunakan pendekatan *camels* dari Bank Indonesia dan nanti akan muncul di Bank Indonesia grade a, grade b dan grade c. Kami hanya boleh menempatkan deposito di grade a dan grade b dari grade a dan grade b itulah muncul bank-bank BUMN, muncul bank-bank daerah, dan muncul sebagian bank swasta. Terhadap ketiga bank ini tidak bisa serta merta ditempatkan, ada kriteria lain, harus ada mutual relationship dengan BPJS TK, kami menempatkan dana dilihat tingkat bunganya, kami menempatkan dana sepanjang mereka membantu kami meningkatkan kepesertaan.

Untuk itu saya lapor Bapak dan Ibu sekalian, kami sudah bekerjasama dengan BRI memiliki 1.102 outlet diseluruh Indonesia, dimana cabang-cabang BRI itu bisa tempat orang mendaftar, bisa tempat orang claim, bisa tempat orang membayar iuran dia. Jadi penempatan dana deposito bukan berdasarkan proposal tapi berdasarkan kriteria-kriteria yang tadi, mohon maaf kalau Pak Daniel punya misalkan bank X belum tentu bisa juga Pak kalau dia nggak masuk dalam grade ini. Di saham kami hanya boleh investasi di LQ-45, bank-bank yang kapitalisasi pasarnya di atas 10 triliun, bank-bank yang free float di atas 20%. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan mau jual saham dibawah 5% kami tidak bisa masuk karena kriteria seperti itu. Penempatan dana di Reksadana hanya boleh dilakukan terhadap manajer investasi yang kelolaannya di atas satu triliun, dibawa itu tidak bisa masuk.

Jadi maksud saya sangat *strictly*, sangat *regulated* dan semuanya diatur berdasarkan sistem dalam hal investasi yang tadi. Tentang anak perusahaan, kami memang bencana memiliki beberapa anak perusahaan tetapi ini bukan karena dimasukkan tidak terjangkau pengawasannya tetapi lebih kepada memudahkan implementasi. Salah satunya kami sedang membangun *investment company* berbasis syariah bekerjasama dengan sebuah lembaga dari Arab Saudi, *background* dari rencana ini adalah supaya dana dari *middle east* bisa masuk ke Indonesia, kemudian mereka memiliki *expert* dan *experience* dalam bidang Syariah, dan kemudian investasi langsung di Indonesia berbasis syariah masih terbatas Dengan cara ini kita harapkan kami bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

### **Bapak dan Ibu sekalian.**

Kami akan lanjutkan merespon secara garis besar terhadap yang dipertanyakan Bapak Ibu Anggota Dewan. Ibu Okky, tadi tentang jaminan pensiun, iuran belum sepakat, betul sekarang antara 8% atau 3%, 8% sudah disepakati oleh 3 lembaga, 3% diinginkan oleh salah satu kementerian, jadi diharapkan dalam

harmonisasi terakhir pembicaraan kami dengan Menko Perekonomian *Insyah Allah* di bulan April ini akan terjadi penyelesaian dan pertemuan itu. Kajian KPK tentang dewan pengawasan dan direksi *conflict of interest*, ini menurut hemat kami lebih kepada mungkin miss interpretasi karena gaji Dewas dan gaji Direksi sudah di tetapkan, tidak bisa diubah oleh pengurus, yang menetapkan gaji Dewas dan gaji Direksi adalah Presiden.

Nah ketika dianggarkan, anggaran itu itu masuk dalam RKA tidak bisa mengubah gaji tersebut, tidak bisa mengubah fasilitas yang ada, karena sudah ditentukan oleh keputusan presiden. Nah tetapi untuk transparansi RKA ini juga dikirimkan kepada Menteri Keuangan dan direvisi oleh Menteri Keuangan, lalu berdasarkan itu muncullah Peraturan Menteri Keuangan tentang berapa biaya operasional yang di pakai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kami tidak memutuskan sendiri, itu ditentukan oleh Menteri Keuangan, jadi harusnya mohon maaf agak kasihan juga Ibu dengan kami boleh becanda dikit pak ya? Pekerjaan sangat jelas Pak, ... tidak jelas. Lalu beasiswa untuk anak peserta berapa anak dan seterusnya. Hanya boleh satu anak pak sampai dengan usia 21 tahun mendapatkan sekaligus sebesar Rp. 12 juta. Jadi kalau anaknya tiga hanya dapat satu karena ini tergantung dari dana yang tersedia. Dari SD sampai perguruan tinggi, maksimum sampai dengan usia 21 tahun. Pekerja bukan penerima upah 6.800 iurannya ini ditetapkan bukan oleh kami tetapi oleh kementerian-kementerian terkait tadi, perhitungan ini didasarkan atas kemampuan membayar pekerja bukan penerima upah. Pembangunan Rusunawa, Rusunami tadi sudah saya jelaskan ada 6 Rusunawa.

Kemudian Rusunami, kami sekarang melakukan sendiri dan bekerja sama dengan *developer*.

#### **INTERUPSI F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH):**

Pimpinan interupsi sebentar,

#### **KETUA RAPAT :**

Kalau boleh Pak tadi 6.800 itu kalau kami mendaftar langsung ke cabang?

#### **DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Ya Pak, jadi diseluruh cabang mana pun kami sudah menerima untuk pekerja bukan penerima upah.

#### **F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH):**

Termasuk persyaratan-persyaratannya?

#### **DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Ya Pak Ali, kami jelaskan sedikit begini, Pekerja bukan penerima upah itu juga dibagi kategorinya, sebagai pemberi kerja dan sebagai pekerja. Jadi kalau ada warung, ada pemiliknya itu disebut pemberi kerja, yang melayani itu pekerja Pak, itu untuk pekerja bukan penerima upah. Sedangkan yang Bapak maksudkan tadi guru-guru honorer itu tergolong pekerja penerima upah karena honorinya

dibayarkan oleh sekolahnya dan sekolahnya berkewajiban mendaftarkan itu, jika tidak mendaftarkan maka akan ada sanksi-sanksi tertentu Pak. Juga tadi ada pertanyaan kenapa jumlah kepesertaan belum meningkat dan seterusnya, ketika kami masih sebagai PT. Jamsostek kami tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa kalau ada perusahaan-perusahaan yang belum ikut serta kami laporkan kepada Kementerian terkait, kewenangannya tidak dikami. Tetapi mulai tanggal 1 Juli 2015 kami akan memiliki kewenangan mengawasi dan memeriksa dan sekarang kami sudah memiliki 127 tenaga pengawas pemeriksa yang kami latih dan ditempatkan dikantor-kantor cabang untuk nanti berkunjung ke perusahaan-perusahaan. Tentang Rusunami langsung dengan bekerjasama, bukan berarti kami ingin menjadi developer bu, tetapi pembiayaannya langsung dari kami sedangkan yang bekerjasama pembiayaannya lewat bank. Jadi bank memberikan kredit konstruksi kepada mereka tetapi lokasinya bisa kami tentukan yang dekat dengan kantor-kantor pekerja.

Saat ini kami sudah membangun 1.500 unit di Serang di Lebak, 500 unit di Karawang, 1.500 di Palembang dan beberapa tempat yang lain. COB, kami memiliki kerjasama langsung dengan sekarang berapa jumlah rumah sakit? 2.500 rumah sakit diseluruh Indonesia, kami sebut sebagai RSTC (Rumah Sakit Ramah Center). Rumah sakit-rumah sakit ini ada yang dimiliki oleh swasta, pemerintah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, bekerjasama dengan TNI, Polri. Jadi di 2.500 itu seluruh pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa dilayani bu. COB juga demikian, kami bekerja sama dengan Jasa Raharja tetapi itu hanya untuk penanganan pertama karena sisa biayanya akan tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Berikutnya Pak Ali Mahir tema kasih pak untuk pertanyaannya. Kenapa peserta 16,9 apakah baru lama? tidak Pak Ali, peserta ini bertumbuh setiap tahun rata-rata dalam 5 tahun terakhir 24%, dari 9 juta sekarang mencapai 16,9 juta, jadi bukan peserta lama ini adalah peserta baru. Kenapa kemudian belum seluruh pekerja menjadi peserta? Kau boleh terus terang agak berbeda dengan gadis kesehatan karena BPJS Kesehatan itu iurannya dibayarkan pemerintah maka pasti pekerjanya akan langsung mendaftarkan diri. Sedangkan di kami iurannya dibayar sendiri jadi banyak masyarakat belum merasa ini sebagai keperluan. Oleh karena itu kami transformasi agar ini bukan kewajiban tapi kebutuhan. Nah dari 16,7 itu kami targetkan ditahun 2015 ini menjadi 20,2 juta TK sebagai peserta kami, dan kita sudah punya *roadmap* sampai dengan 2018 sebanyak 80% dari TK formal dan 5% dari TK informal, ini juga untuk menjawab pertanyaan beberapa anggota dewan tadi kenapa cuma 80% dan 5%? ini sesuai *roadmap* yang disiapkan pemerintah cq Bappenas yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Kepres. Tetapi 80% itu sebenarnya dengan proyeksi nanti pekerja formal ditahun 2018 adalah 47 juta yang jadi peserta kami 42 juta. 5% itu diambil dari 76 juta pak jadi sekitar 3,5 juta menjadi peserta kami. Kenapa cuma 5% karena ada pentahapan kepesertaan, tidak seluruh pekerja informal itu mandatori tetapi ada yang bersifat voluntary untuk program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Nah kami sudah melakukan sosialisasi diseluruh kantor-kantor cabang, saat ini kami menugaskan 127 kantor cabang untuk melakukan sosialisasi setiap bulan di pasar-pasar, di universitas-universitas dan di berbagai tempat. Tentu bapak-bapak anggota dewan yang terhormat jika nanti ini kebetulan ke daerah berkenan untuk melihat juga sosialisasi yang kami lakukan. *Insya Allah* akan segera diinformasikan pak jadwalnya.

Berikutnya apakah ada kendala ? ada kendala pak, kendalanya tentu pertama dari kami sendiri sosialisasinya mungkin harus lebih ditingkatkan, yang kedua harus terus terang diakui masih cukup banyak perusahaan-perusahaan yang tidak patuh termasuk di Dapil Bapak, itu di Jawa Tengah ada PPRK disitu yang belum menjadi peserta kami karena mereka membuat lembaga sendiri. Jadi kalau Bapak berkenan membantu kami mungkin PPRK itu bisa.

Mahir ali Anggota ??? Mungkin untuk PPRK ini umurnya jauh lebih tua dari segala organisasi yang ada karena dia perusahaan rokok dan itu sudah berdiri sebelum kita ada. Mekanisme kerja untuk PPRK memang berbeda, saya tahu kapan-kapan kita diskusi lebih lanjut dan beliau-beliau disana bisa kita panggil pak. Jadi mereka ini ya mohon maaf, sangat bagus dan transparan yang saya ketahui dari mulai bisa dikatakan mulai dari keluarga baru ya sampai Ibu hamil, sampai melahirkan itu semuanya ada jaminannya yang jelas cuma *step by step* untuk mereka-mereka sendiri.

Jadi PPRK itu kan Persatuan Perusahaan Rokok Kudus, tetangga saya kebetulan Bapak Ketua jadi saya cukup tahu banyak mengenai itu. Untuk ini bisa tidak dijadikan acuan ya, susah nanti, bapak-bapak akan susah karena mereka terlalu perumahannya saja mungkin kalah itu rumah susun di Tebet, ya mohon maaf ya, jadi mungkin saya yang secara umum dulu ya.

Terima kasih Bapak.

.....:

## **DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Baik Pak Ali. Saya hanya menginformasikan ketika ada kendala, ada situasi begitu tapi tentu nanti kita memungkinkan untuk membicarakannya lebih lanjut. Pak Ali Taher tadi juga bertanya tentang KCP? kami bangun 150 berapa tambahan SDM? Dalam KCP ini ada beberapa kategori Pak, kami sebut sebagai kantor cabang perintis mandiri dan kantor cabang perintis supporting. Kantor cabang mandiri KCP Mandiri itu akan memiliki SDM 3 sampai 5 orang, sedangkan KCP supporting itu 1 sampai 3 orang. Nah darimana jumlah SDM-nya? kami lakukan *redeployment* dari ada, dan kemudian juga ada rekrutment yang baru. Tentu ada kriteria-kriteria untuk itu dan kami sudah hitung kebutuhannya lebih kurang sekitar 400 orang untuk bisa mengelola KCP ini. Jumlah perusahaan peserta kami laporkan juga buat bapak Pimpinan, saat ini di Indonesia ada lebih kurang 620.000 perusahaan yang menjadi peserta kami baru 186.000 perusahaan tetapi dari 600.000 perusahaan itu kita bagi kategorinya ada perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Perusahaan besar rata-rata sudah menjadi peserta kami, yang belum adalah perusahaan menengah dan kecil dan ini yang akan kita sosialisasikan lebih intensif. Beasiswa kami sudah jawab tadi 12 juta pak. Kemudian pekerja bukan penerima upah guru honorer mereka wajib karena mereka menerima upah tentu sekolahnya mesti mendaftarkan.

Pak Ketut Sustiawan, transformasi kami ini berapa pengalihan aset dan seterusnya itu sebelumnya dilakukan audit oleh BPK dan KAP dan ini kemudian ada laporan keuangan penutup yang ditandatangani oleh Menteri BUMN, kemudian ada laporan keuangan pembuka yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

Asetnya sama dan berdasarkan hasil audit dari RKAP beserta BPK. Besarnya iuran manfaat untuk pensiun kami sudah jelaskan tadi.

Kemudian investasi BPJS TK seperti apa? Kami sudah jelaskan apakah ada reasuransi? tidak ada Pak. Jadi kami menanggung sendiri semuanya, buat Bapak dan Ibu sekalian untuk informasi sebagai BPJS kami memiliki 9 prinsip yaitu prinsip gotong royong, gotong royong ini maknanya kalau di kesehatan yang sehat membantu yang sakit, kalau di kami untuk pensiun yang muda membantu yang tua, kemudian untuk kecelakaan kerja yang tidak celaka membantu yang celaka, kematian yang hidup membantu yang meninggal itu makna gotong royong. Kemudian nirlaba, kami aset memang bertumbuh terus Pak Dede tetapi sepenuhnya hak pekerja, kami mengelola 2 keranjang yang pertama disebut dana jaminan sosial yang kedua dana BPJS, BPJS ini berasal dari equity Jamsostek yang berpindah ke kami sedangkan DJSN adalah iuran peserta. Iuran peserta ini berbeda dengan waktu jaman Jamsostek, kalau jaman Jamsostek ada nama program JKK, JKM, jika claim-nya lebih rendah dari iuran maka iurannya menjadi milik perusahaan, tetapi setelah menjadi BPJS ada claim maupun tidak ada claim iurannya milik peserta. Hanya saja iuran itu akan berakumulasi terus sebagai *reserved* kalau suatu ketika terjadi atas ... dan seterusnya untuk mengatasi mereka.

Jadi kami nirlaba seperti tadi Pak kami tidak punya profit, biaya operasional kami ditentukan, gaji kami sudah ditentukan, fasilitas kami sudah ditentukan tidak boleh lebih dari itu Pak, istilahnya kurang pak. Pak Djoni apakah pengelolaan investasi per program? Dalam hasil pengembangannya tadi sudah kami jelaskan saya kira berdasarkan PP 99. Ibu Siti, apakah ada pelibatan pihak eksternal terhadap RKA? tadi sudah kami jelaskan. Dan saat ini bahkan kami sudah mengirimkan surat kepada DJSN meminta pandangan DJSN untuk juga turut serta mereview RKA tersebut. Peraturan belum selesai, tadi sudah kami sampaikan tinggal jaminan pensiun saja yang belum. Program pensiun apakah wajib untuk seluruh perusahaan? Jawabannya adalah wajib. Meskipun sudah ikut serta dengan program pensiun yang lain di BPJS TK bersifat wajib karena dia merupakan pensiun dasar.

### **Bapak Ibu sekalian yang terhormat.**

Kalau boleh ijin, konsep pensiun itu sebenarnya piramid yang paling bawah disebut program dasar, yang ditengah ini adalah *complement*, yang paling atas premium. Bagi siapa pun harus ikut serta peran program yang dasar, jika perusahaan memiliki kemampuan lebih dia boleh ikut serta yang ditengah dengan perusahaan asuransi komersial atau juga yang premium diatas, tetapi yang di bawah juga ikut serta.

### **F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA):**

Pimpinan.

Tadi ada pertanyaan saya yang belum terjawab terlewatkan Pak Elvyn mengenai imbal hasil 5 tahun terakhir seperti yang apa kira-kira ya.

## **DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Pak Djoni untuk dana kelolaan kami dari 2010 sampai 2014 itu *average growth* nya adalah 17,3% *year on year*-nya 25%, pertumbuhannya, kalau boleh saya sebut angkanya di 2010 itu masih 98 triliun, 2011 itu 111 triliun, 2012 itu 133 triliun, 2013 itu 149 triliun, 2014 itu 187 triliun, di 2015 ini target kami 220 triliun. Maka kemudian menjawab pertanyaan Pak Daniel juga tadi 5 tahun kedepan *Insyah Allah* bisa 500 triliun, how to reach that Bapak sampaikan? Kami punya target menaikkan jumlah peserta yang sekarang 16,7 menjadi 80% dari pekerja formal lebih kurang 42 juta. Dana yang ada sekarang ini akan bertumbuh setiap tahun lebih kurang 20%, jadi kalau sekarang 200 triliun 20 dikali 5 itu 100 triliun pak itu sudah 200 tambah 200 jadi 400 ditambah dengan iuran tadi maka lebih kurang dia menjadi 500 sekian.

## **INTERUPSI ANGGOTA F-... :**

Sedikit saja Pak Elvyn.

Saya pernah membaca tulisan sekitar sudah ada 3 tahun atau 4 tahun gitu ya, seharusnya dana yang dimiliki oleh pada waktu Jamsostek yang sekarang BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dia memiliki dana 2.320 triliun seharusnya pak ya, kalau berjalan semuanya, inikan normal. Berarti Bapak akan memegang uang 2.320 triliun, itu saya pernah baca tulisan. Sebab kenapa, untuk Singapura saja negara sekecil itu itu sekarang 1.400 triliun, untuk negara Malaysia sekecil itu juga itu sekarang hampir 1000 triliun. Nah kita yang berpenduduk 250 yang Bapak bilang tadi berapa perusahaan tadi itu yang baru berapa yang masuk, yang masuk pun sedikit pak dari perusahaan itu, gajinya pun yang dilaporkan juga sedikit gitu, sudah dilaporkan gaji sedikit umpamanya pekerja buruhnya itu 2.000, dilaporkanlah umpamanya 200 atau 300, dari tingkat bawah sampai atas yang bergaji 10 juta dikasih 2 juta dilaporkan begitu ya, ini semuanya laporan palsu Pak. Baik dari Bapak maupun juga dari pengawas ketenagakerjaan, ini sering kita sebut juga di sini.

Kenapa dana tadi itu bapak bilang mungkin 2015 nanti, 2016 nanti atau 5 tahun kedepan 500 triliun ya wah itu dari bandingan-bandingan dengan negara kecil tadi itu Pak itu nggak seberapa pak. Saya mengikuti uang Jamsostek dari 5 triliun pak, sudah lama sudah berapa periode saya mengikuti pak. Tapi selalu kita berkoar-koar seperti ini tetap saja ini pak pimpinan tetap saja baik dari BPJS Ketenagakerjaan maupun dari pengawasan maupun dari perusahaan ini kongkalikong, coba umpamanya ada satu perusahaan A pekerjanya 5.000 ya laporkan yang 5.000 itu, begitu laporkan yang 5.000 itu dilaporkan juga sesuai gaji yang dia dapatkan begitu.

Wah itu bisa bapak perlu SDM yang yang mumpuni nanti Bapak untuk mengelola ini gitu. Ya memang mudah-mudahan nanti kita dengan Komisi IX DPR RI ini dengan BPJS Ketenagakerjaan ini kita bekerja lebih rapi lagi dan lebih serius lagi, ya saya kira ini mungkin kita targetkan mungkin nggak usahlah 2.320 sesuai dengan tulisan tadi itu ya, kita targetkan nanti 2019 sudah ada dana di jaminan BPJS Ketenagakerjaan ini 1.000 triliun, dan itu bisa Pak. Tapi Bapak panggil semua pengawas-pengawas itu, jangan tunduk dengan Depnaker begitu juga para pengusaha-pengusaha itu gitu ya, ini nanti dibelakang meja dikasih sedikit

ininya sudah meper-meper begitu. Coba di cek yang benar itu berapa pesertanya gitu kan, sesuai itu saja, gaji yang umpamanya sesuai dengan yang saya bilang tadi lah.

Itu saja mungkin ya sekedar saya tadi tertarik antara Bapak Dirut dengan Pak Daniel. Pak Daniel ini ahli CSR pak, pakar TJSL ini, dan pernah direksi perusahaan besar nah makanya tadi tertarik tadi mohon kita ini mungkin bahan pemikiran buat kita, masa kita kalah dengan negeri sekecil itu. Ya seandainya pipis kita semuanya ini akan tenggelam dua negara itu ya, ini kok kita 250 juta pekerja berapa padahal perusahaan-perusahaan itu di kita masa uang saja perusahaan mereka disini uang disimpan di Singapura, uang disimpan di Hongkong, uang disimpan di Beijing sana gitu.

Cukup Pak Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih. Tadi kita sampai jam satu, saya ijin tambah 30 menit ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Silakan Pak Dirut.

**DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Baik, dilanjutkan Pimpinan.

Ya mungkin merespon yang terakhir tadi sebelum saya tambahkan jawaban-jawaban saya. Terima kasih Pak, saya sependapat dengan bapak dengan yang tadi bahwa kita harus lebih tinggi tetapi disisi lain barangkali untuk klarifikasi pak, saya juga membaca artikel itu dalam artikel itu ada asumsi-asumsi, misalnya seperti kita sekarang ini iuran kita 5,7% pak, kalau di Singapura itu 34%, kemudian di Malaysia 22%, itu yang pertama. Yang kedua kemudian seluruh pekerja disana memang ikutserta, dikita tidak ikut serta, Tanpa bermaksud menjustifikasi Pak Siregar, ketika kami sebagai PT. Jamsostek kami tidak memiliki kewenangan memeriksa, berarti per 1 Juli nanti kewenangan itu akan ada di kami *Insy Allah* dengan cara itu bisa lebih cepat peningkatan kepesertaannya. Kami setuju dengan Bapak, banyak sekali data-data di kami disebut istilahnya PDS Pak Perusahaan Daftar Sebagian, karyawannya 1000 terdaftar 700, gajinya 5 juta dilaporkan 3 juta. Mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki kedepan dengan dukungan Bapak Ibu sekalian.

Yang tadi tentu kalau boleh terus terang Pak kami pernah mengusulkan juga kepada pemerintah apakah iuran ini tidak sebaiknya dinaikkan? Karena 5,7% itu berdasarkan data termasuk nomor dua terendah di dunia Pak. Negara-negara di asia pasifik disana adalah diatas 10% tapi tentu bergantung kemampuan ekonomi kita.



### **F-PKS (ANSORI Lc):**

Sedikit lagi melalui Pimpinan biar nyambung, di Malaysia itu Jamsosteknya itu mempunyai kewenangan dengan rekomendasi dia ke Departemen Ketenagakerjaannya, kalau seandainya ada satu perusahaan yang melaporkan pesertanya dan gajinya palsu, tidak sesuai itu bisa dicabut. Sedangkan penegakan Hukum dikita ini nggak ada ini, nah mungkin harus kita perkuat dengan Undang-Undang barangkali ini gitu, karena lemah kita. Terima kasih. Saya lanjutkan Pak Pimpinan untuk melengkapi pertanyaan Pak Djoni tadi tentang ... investasi. 2014 ini seperti yang saya utarakan 187 triliun pak naik dia menjadi 500 triliun, itu 2015 230, 2016 sekitar 300, 2017 sekitar 390 dengan pertumbuhan rata-rata 21%.

Jadi itu perkiraannya, imbal hasilnya sampai 5 tahun terakhir diatas 10% Pak, lebih tinggi ketimbang hasil dari perbankan. Saya ingin melanjutkan dengan merespon beberapa jawaban pertanyaan tadi..

### **F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA):**

Pimpinan pendalaman sedikit.

Ke Pak Elvyn kalau yang dibagikan masuk ke saldo individu itu berapa, apakah seluruh hasil pengembangan itu dimasukkan atau seperti apa setelah dipotong biaya pengelolaan seperti itu. Terima kasih.

### **DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Terima kasih Pak Djoni. Ketika masih PT. Jamsostek tidak sepenuhnya seluruhnya dibayarkan karena ada ... Ketentuan akuntansinya ada ... yang harus dicadangkan tapi bukan deviden pak, sebelum tahun 2007 ada deviden, setelah tahun 2007 tidak ada deviden, tetapi yang saya masukkan ini hanya hasil investasi itu, kalau hasilnya 100 tidak 100 didistribusikan, 10 masih ditahan karena ketentuannya ada reserved, pencadangan, bukan diambil perusahaan tapi pencadangan. Sekarang setelah menjadi badan hukum publik 100% dialokasikan ke masing-masing rekening, dan itu sudah ada daftar mereka Pak, jadi tidak ada diambil oleh institusi satu rupiah pun karena institusi, biaya operasionalnya tadi sudah ditentukan oleh pemerintah. Terakhir di tahun 2014 yang lalu kami distribusikan 10,55% dari saldonya sebagai yield investment mereka.

Pak Imam Suroso tentang sosialisasi, beliau nggak ada tapi mungkin bisa dicatatkan.

### **KETUA RAPAT :**

Sudah keluar, jadi tertulis saja nanti.

### **DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Ibu Amelia juga kebetulan nggak ada ditempat lagi. Pak Pimpinan sidang secara umum tadi sudah saya jawabkan, kalau diizinkan mungkin beberapa direksi

saya mungkin bisa menambahkan supaya lebih jelas. Saya mulai dengan Pak Dirpes Silakan.

**DIRPRES:**

Baik terima kasih Pak Dirut.

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi,  
Bapak-bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI.**

Sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirut tadi bahwa terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang secara umum dan sebagian secara spesifik juga sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Barangkali ada sedikit yang perlu kami tambahkan tentang apa yang mendasari angka-angka yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi. Jadi dalam 5 tahun ke depan di Direktorat Investasi ini juga memiliki *milestone /road map* , tahapan apa yang akan kami capai baik dari sisi kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu diantaranya ditahun ini strategi kami adalah *strengthening capacity for new investment rule* jadi tahun ini kami ingin ditahun lalu 2014 kami setelah reformasi kami ingin *investment rule* itu telah diimplementasikan dengan peningkatan kapasitas, di tahun 2015 ini kami akan mengoperasikan seluruh investment paradigm yang baru karena mengingat pola-pola baru yang dibagi dalam beberapa program kami juga perlu menekankan hal tersebut. Kemudian di tahun 2016 kami targetkan dalam sisi kualitatifnya adalah *excellent direct investment performance*, jadi kinerja investasi yang *excellent*, investasi langsung yang *excellent*.

Nah dari situ kami targetkan angka 300 triliun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut sehingga diharapkan dalam 2 tahun berikutnya kedepan kami bisa mencapai yang kami sebut dengan *intensify total benefit* , *total benefit* tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elvyn ada *food benefit*, ada *housing benefit*, ada *transportation benefit*, kita intensifkan itu sehingga ditahun 2017 bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya yang paling optimal dan saat itu target hasil investasi kita adalah 400 triliun. Sehingga ditahun 2018 satu langkah berikutnya dari dana 400 triliun itu menjadi 100 triliun kami kira bukan sesuatu yang mustahil pak secara CAGR ... sekitar 20% mulai dari 2014 sampai 2018.

Dalam pengelolaan dana ini kami juga didasari oleh regulasi PP 99 Tahun 2013 yang dalam beberapa bulan ke depan kami akan merevisi karena ada satu program pensiun yang belum diatur disana dan program pensiun ini efektif berlaku 1 Juli 2015 ini, maka sebelum 1 Juli 2015 PP tentang program pensiun tersebut diharapkan bisa terlaksana. Tambahan berikutnya adalah tadi juga sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Elvyn bahwa pengelolaan dana ini pemilihan instrumen dan jenis-jenis investasinya didasari oleh ketentuan peraturan pemerintah yang dielaborasi didalam peraturan-peraturan internal BPJS Ketenagakerjaan. Saham apa yang boleh dimasuki, bank mana yang boleh dipilih, semuanya berdasarkan kriteria dan tersistem Pak sehingga kalau kita paksakan pun 0,1 saja bedanya atau 1% persyaratan saja tidak terpenuhi maka sistem akan menolak , tidak akan bisa di proses.

Ini adalah dalam upaya kami menjadikan pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam tahun 2018 ini menjadi *leading good investment governance*. Sehingga kami berharap Dalam lima tahun kedepan kami bisa menjadi contoh bagi pengelolaan dana investasi BPJS di Indonesia.

Terima kasih pak.

#### **DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Ijinkan yang lain pak. Pak Dirkep silakan tambahkan untuk perluasan kepesertaan.

#### **DIRKEP:**

Baik yang terhormat Bapak Ketua Komisi IX dan Anggota.

Beberapa tambahan yang ingin sampaikan adalah tadi ada yang menyitir mengenai strategi perluasan. Saya ingin tambahkan bahwa sebagai tahapan awal didalam rencana perluasan yang cukup masif adalah kita dengan sengaja membuat kanal-kanal dulu supaya jangan sampai sosialisasi masif tetapi mereka kesulitan mencarinya atau kesulitan untuk menjangkaunya.

Jadi strategi pertama yang kami lakukan adalah memperluas kanal distribusi, makanya kemudian kami kerjasama dengan BRI, kerjasama dengan PPOB dan kanal-kanal elektronik lainnya sehingga kita memiliki kepastian setelah masyarakat memahami, mengerti melalui edukasi kemudian mengaksesnya mudah. Itu strategi yang kami lakukan. Oleh karena itu ada satu peningkatan yang cukup signifikan saat kami Jamsostek dulu hanya 121 kantor cabang, sekarang ini sudah mencapai 1.102 kerjasama dengan perbankan ... Ditambah lagi akan rencana 150 kantor cabang pembantu, dan tentu saja kanal elektronik juga sudah bisa dijangkau, pendaftaran website, pendaftaran lewat online dan pendaftaran lewat hal-hal lain sudah kita coba untuk dibuka semua. Sehingga betul-betul masyarakat tidak kesulitan setelah memahami, tidak kesulitan untuk mengaksesnya.

Itu saja tambahannya Pak Dirut, terima kasih.

#### **DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

##### **Bapak Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat.**

Untuk menambahkan informasi mulai 2015 ini setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan akan terdaftar berdasarkan NIK pak, jadi kita menggunakan e-KTP sebagai nomor kepesertaan kita. Dengan cara ini maka tujuan menggunakan single identity number itu akan terpenuhi.

Saya tadi mohon maaf kelupaan menjawab pertanyaan Pak Daniel tentang *benchmark* supaya *clear* pak. *World class* yang kami maksudkan itu bukan berarti kami ingin membuka cabang diluar negeri, tapi tata kelola BPJS Ketenagakerjaan ini setara dengan tata kelola yang dilakukan oleh lembaga sejenis luar negeri. Itu sebabnya kami *benchmark* ke Eropa, ke Asia dan ke berbagai negara dan sebahagian yang kita miliki bahkan boleh dikatakan lebih baik, misalnya dari hasil investasi kita lebih baik dari mereka.

Pengelolaan data kita meniru yang dilakukan oleh Prancis, kemudian pengelolaan kepesertaan kita meniruyang dari Filipina pak. Di asia ini ada ya dua negara yang baik yaitu Philipina dan Korea selatan, Kores selatan itu untuk program jaminan kecelakaan kerja, Philipina itu untuk program jaminan hari tua karena

Pilipina bahkan *including migrant workers*. Nah *migrant workers* ini kita kita belum *including* karena ketentuan Undang-Undangnya tidak memasukkan itu. Tadi juga ada pertanyaan bagaimana perlindungan TKA? Nah dari luar negeri itu di luar domain kami Pak, sekarang dikelola oleh BNP2TKI dan tetapi kami pernah berkoordinasi dengan mereka bagaimana agar TKA-TKA yang TKI kita diluar negeri bisa terlindungi. Tentang TKA yang ada di Indonesia, mereka wajib menjadi peserta kita . Nah kami sudah mem-*propose* sebenarnya yang disebut dengan *coordination of benefit* antar negara tetapi kami tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan ini karena itu G to G pak, itu sifatnya negara dengan negara, kami sudah propose ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja konsepnya adalah transfer benefit. Artinya kalau tenaga kerja kita di luar negeri dia mendapatkan perlindungan dengan manfaat seperti yang berlaku di sini, nanti disana dibayarkan kita transfer ke sana, tenaga kerja asing yang di Indonesia mendapatkan manfaat seperti yang diterima dinegara dia, kita bayarkan nanti kita tagihkan dari negara dia.

Konsep inilah kami *propose* tetapi sekali lagi masih menunggu dari pemerintah untuk apakah ini bisa dieksekusi atau tidak. *World class* yang lain pak, *smart financial management* kami sudah memberlakukan *cashless transaction*, tidak ada lagi pembayaran claim secara tunai mereka yang mengajukan *claim* , *claim*-nya diterima direkening mereka di bank itu bahagian disebut dengan *world class smart financial management*, jadi *non cash transaction*. Kemudian *world class social security administration*, itu yang tadi saya sebutkan *online*, bisa ditagih dimana saja bisa, bisa daftar dimana saja, istilah kami *anywhere*, *anyhow* dan *anytime* .

Nah untuk bukti yang lebih konkrit kami mulai 2015 ini menerapkan *ISA guidelines* , *ISA guidelines* itu adalah internasional *social security association guideline*, jadi parameter-parameter yang berlaku secara internasional itu kita terapkan di Indonesia. Dalam konteks *quality controll*, dalam konteks *services* apa saja parameter-parameter service berkelas internasional itu kami terapkan di Indonesia, untuk contoh misalnya service kami *speed*-nya harus tinggi tadi yang 2 minggu jadi 20 menit, kemudian akurat , dia tidak boleh terima tunai tapi harus terima dari rekeningnya, dalam bentuk transfer ke rekeningnya. Kemudian akses bisa claim di mana saja, dan yang keempat *friendly*. Untuk menunjukkan apakah ini sudah baik atau tidak setiap 6 bulan kami melakukan survey dan saat ini tingkat *customer satisfaction* terhadap BPJS Ketenagakerjaan berada diangka 86, target kami akhir tahun nanti 90 pak, karena kalau sudah 90 itu sudah *world class institution*. Lalu secara branding kami juga punya target ada istilah kami 1510 1510 itu artinya kalau 10 orang ditanya maka 5 orang itu sudah peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan ini akan kita tingkatkan menjadi 1710, tentu dibutuhkan waktu bapak-bapak bisa melihat didalam roadmap kami dan setiap tahun kami melakukan survey, kami dievaluasi oleh berbagai pihak termasuk BPK, OJK, DJSN dan tentu Bapak Ibu sekalian.

Saya kira itu pak yang kami bisa tanggap terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi dan kami akan jawab ini secara lebih lengkap melalui tertulis kepada Bapak dan Ibu sekalian.

Sekali lagi terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

## KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dirut.

Cukup ya respon, jawaban, sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya yaitu membacakan kesimpulan dari RDP ini. Seperti yang diatur dalam MD3 bahwa kesimpulan yang kita ambil baik dalam Raker maupun RDP tentu mengikat kedua belah pihak untuk bisa dilaksanakan. Ada 6 poin draft kesimpulan, saya tujukan dulu kepada Anggota Komisi IX sesudah itu baru nanti ke Pak Dirut.

1. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan program bantuan kesejahteraan antara lain bantuan beasiswa kepada putra putri peserta yang mengalami kecelakaan kerja, bantuan uang muka perumahan, bantuan program Rusunawa serta bantuan iuran kepada pekerja yang tidak mampu, anak terlantar dan fakir miskin sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk:
  - a. Menyelesaikan pengalihan aset dana jaminan sosial ke BPJS Ketenagakerjaan
  - b. Mengantisipasi permasalahan yang akan dihadapi dari *roadmap* operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015
  - c. Mengembangkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, investasi rumah susun sederhana, sewa, toko swalayan, transportasi sehingga manfaat investasi yang dilakukan lebih berpihak kepada peserta atau buruh
  - d. Menetapkan besaran iuran dan manfaat jaminan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan peserta, perusahaan dan keberlangsungan program jaminan sosial.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian termasuk persepsi BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan, pekerja formal dan informal termasuk guru honorer, usaha kecil, usaha mikro, dalam rangka meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan Anggota Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan program jaminan sosial termasuk review program dan investasi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Komisi IX DPR RI mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program bantuan iuran melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) kepada petani, pekerja miskin, nelayan untuk dimasukkan ke dalam ABPN.
6. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan laporan hasil investasi termasuk jenis-jenis investasi dan pengembangannya serta pengembalian investasi kepada peserta yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir, disampaikan selambat-lambatnya 13 April 2015.

Itulah Bapak Ibu, Anggota Komisi IX draft kesimpulan dari RDP ini. Kami persilakan kalau ada saran dan ada usul, cukup? Cukup ya? Pak Daniel ada masukan?

**F-PDIP (DANIEL LUMBAN TOBING):**

Pimpinan, yang nomor 4 ya kalau nggak salah, masukin ke APBN itu maksudnya apa pinnan?

**KETUA RAPAT :**

Ya, jadi ada bagian-bagian yang kalau itu diperlukan, tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan menganggap itu mampu dilakukan nggak perlu, tapi kalau ada semangat yang besar tapi belum bisa dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan bisa diusulkan dalam APBN.

**KETUA KOMISI IX (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I. PoI/F-PD):**

Pimpinan, saya mau menambahkan Pak Dirut, program TJSL ini Bapak katakan hanya 12 miliar yang berupa CSR diambil dari biaya operasional betul pak? Artinya ketika kita berbicara mensupport lebih banyak lagi warga miskin dan sebagainya tentu tidak boleh ambil dari biaya operasional, tapi nanti konsepnya masuk kepada belanja. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kita bisakah kita masukan ke dalam APBN atau belanja tadi?

**DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Terima kasih Pimpinan.

Sepengetahuan kami untuk hal-hal demikian mungkin diluar domain kewenangan kami Pak, karena hal itu harus diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kami lakukan itu adalah berdasarkan kemampuan kami, kapasitas yang kami miliki , yang dimungkinkan adalah untuk misalkan di tahun-tahun mendatang menaikkan alokasi biaya operasional sehingga bagian biaya operasional yang menjadi TJSL itu juga bisa lebih besar. Itu bisa dan itu merupakan usulan kami untuk biaya operasionalnya tetapi persetujuannya dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan. Baik cukup dari anggota?

**F-PDIP (DANIEL LUMBAN TOBING):**

Nomor 5 kesimpulannya bagaimana Pimpinan?

**KETUA RAPAT :**

APBN nya didrop.

**F-PDIP (DANIEL LUMBAN TOBING):**

Ya saya pikir nomor 5 didrop saja semua pimpinan. Karena kan permasalahan mereka yang tiap tahun itu kan sebenarnya disetujui oleh Kementerian Keuangan, mungkin kita sekali-sekali panggil Kementerian Keuangan bagaimana mereka memutuskan operasional BPJS Ketenagakerjaan termasuk BPJS Kesehatan supaya kita juga gambaran lebih jelas. Mungkin itu juga, karena

kita belum jelas bagaimana hitung-hitungan dengan Kementerian Keuangan jadi kita saya pikir nomor 5 sih dirop saja Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Semangatnya kita dukung bahwa da peningkatan TJSJ , jadi dari 12 mungkin bisa menjadi , tapi yang kita sepakati adalah tidak menjadi beban APBN tapi kita dorong BPJS Ketenagakerjaan ini meningkatkan TJSJ dari waktu ke waktu, semangat poin 5 itu seperti itu. Cukup ya? Kalau cukup kami persilakan kepada Pak Dirut apakah ini bisa di terima?

**F-PKS (ANSORY SIREGAR, Lc):**

Sedikit Pimpinan.

Kalau ada keputusan untuk mendorong, Komis IX mendorong untuk meningkatkan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan diminta meningkatkan kepesertaan, seperti yang tadikan istilahnya ada perusahaan itu punya 5.000 pekerja yang didaftarkan 1.000 kemudian juga gajinya 5 sampai ini, nah ini kita dorong ini ada satu keputusan mendorong apa namanya BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja begitu. Pak Anshori tadi disebutkan oleh Dirut bahwa mulai 1 Juli 2015 peran BPJS dalam pengawasan itu akan dengan sendirinya berjalan , saya kira semangatnya sudah masuk pada poin 2b masuk pada kalau gitu diselipkan bahasa pengawasan disitu, mengantisipasi permasalahan yang akan dihadapi ya, termasuk meningkatnya pengawasan.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira bagus. Silakan Pak Dirut.

**DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Terima kasih Pimpinan.

Kalau boleh ijin, khusus nomor 2a. sepengetahuan kami sudah selesai dengan dibukanya laporan keuangan 2014 , aset itu sudah beralih ke BPJS Ketenagakerjaan jadi kalau boleh didrop saja.

**KETUA RAPAT :**

Poin a didrop.

**DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Kemudian yang nomor c menetapkan besaran iuran itu seperti tadi kami utarakan kewenangannya tidak di kami Pak Pimpinan tapi ditetapkan oleh

pemerintah. Sedangkan kami memberikan usulan tentang besarnya iuran tersebut, tetapi keputusannya sebelum ditandatangani oleh presiden itu harus melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Hukum dan HAM beserta DJSN.

**KETUA RAPAT :**

Tapi apakah BPJS punya kewenangan menyampaikan rekomendasi?

**DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Ya.

**KETUA RAPAT :**

Kalau begitu bahasanya bukan menetapkan.

**DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Mengusulkan.

**KETUA RAPAT :**

Coba diubah kalimatnya supaya mengusulkan besaran iuran yang proporsional kira-kira begitu ya.

**DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

Terima kasih Pimpinan. Boleh ke nomor berikutnya? Nomor 3 saya kira bisa diterima Pimpinan, nomor 4 sesuai peraturan perundangan yang berlaku bisa diterima, nomor 5 juga kita tingkatkan sebatas kemampuan perusahaan atau institusi bisa terima, nomor 6 laporan bisa kami laksanakan ini.

Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

**Bapak dan Ibu sekalian.**

Dengan demikian dengan adanya kesepakatan antara komisi dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian 6 kesimpulan dapat kita sahkan, setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**



Baik, sebelum kita akhiri RDP ini kami persilakan Pak Dirut untuk menyampaikan *closing remark*.

**DIRUT BPJS TENAGA KERJA:**

**Pimpinan Komisi IX yang terhormat beserta Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat.**

Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami untuk menyampaikan rencana kerja, menyampaikan perkembangan BPJS Ketenagakerjaan tentu kami berterima kasih dan mohon tetap memberikan dukungan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar bisa beroperasi penuh 1 Juli baru 15 sesuai dengan amanah Undang-Undang, sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Indonesia dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, Direksi dan Karyawan kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh Anggota Komisi IX DPR RI yang sangat supportif dan saat memberikan arahan-arahan yang clear untuk menciptakan jaminan sosial yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Terima kasih sekali lagi.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* RDP antara Komisi IX DPR hari dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan kita akhiri.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.***

**(RAPAT : DITUTUP PUKUL 13:53:49 WIB)**

**Jakarta, 2 April 2015  
Ketua Rapat**

**Ttd**

**Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I. Pol  
A-415**

